

**PENERAPAN BIAYA SUBSIDI LISTRIK DALAM
MENGURANGI TUNGGAKAN PELANGGAN PT PLN
(PERSERO) ULP KRAKSAAN**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Umi Karimah
NIM : 222105030085

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2026

**PENERAPAN BIAYA SUBSIDI LISTRIK DALAM
MENGURANGI TUNGGAKAN PELANGGAN PT PLN
(PERSERO) ULP KRAKSAAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

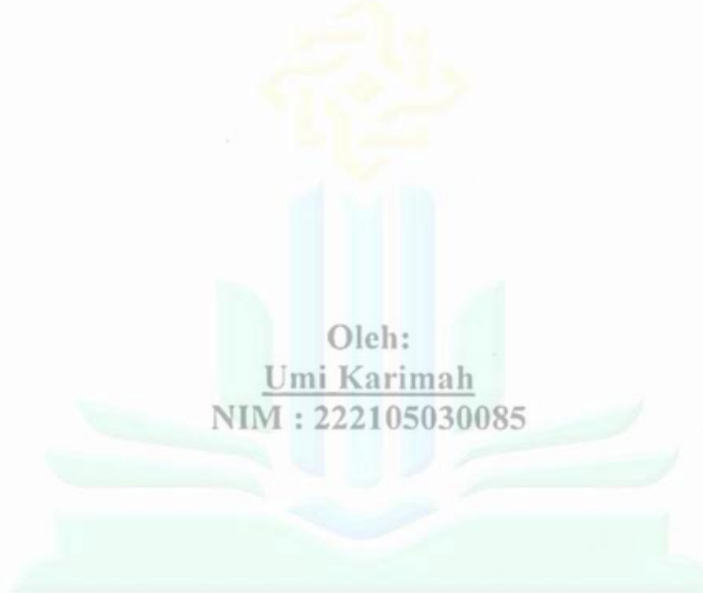
Oleh:
Umi Karimah
NIM : 222105030085

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI PENERAPAN
SUBSIDI LISTRIK DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN
PELANGGAN PT PLN (PERSERO) ULP KRAKSAAN

SKRIPSI



Oleh:
Umi Karimah
NIM : 222105030085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R

Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M
NIP. 197404201998032001

**PENERAPAN BIAYA SUBSIDI LISTRIK DALAM
MENGURANGI TUNGGAKAN PELANGGAN PT PLN
(PERSERO) ULP KRAKSAAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 12 maret 2026

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak
NIP. 198803012018012001

Sekretaris

Dr. Nur Hidayat, S.E., M.M
NIP. 197905052023211015

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
2. Dr. Retna Anggita Ningsih, S.E., M.M

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah ia penangguhan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruhnya) itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui.” Q.S Al-Baqarah ayat 280¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Musthaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-Baqarah 280

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk kekuatan dan kesabaran sehingga proses pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan, karya ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Manusia kuat yang selalu menjadi lentera “Bapak” terimakasih atas segala kerja keras, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah ditunjukkan dengan kata-kata namun selalu terasa dalam setiap langkah. Semoga semua pengorbanan yang selama ini bapak berikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
2. Yang tercinta, Ibu. Terimakasih untuk doa yang tidak pernah putus dan kasih sayang yang tulus. Semoga semua doa baik juga terkabulkan untuk Ibu, seperti mana Ibu selalu memanjatkan doa-doa penuh harapan untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya.
3. Kepada tunangan tercinta saya “M. Aqil Siroj” terimakasih atas cinta dan dukungannya, yang selalu menjadi inspirasi kekuatan dan partner dalam setiap langkah saya.
4. Kepada saudara kandung penulis, “M. Hafiz sulaiman” terimakasih telah menjadi adik yang selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan ini.
5. Kepada sahabat-sahabat ku “Muiszatin dan Putri Dwi Rahayu” dan teman-teman AKS 4 angkatan 2022, terimakasih telah menghiasi perjalanan ini sehingga masa perkuliahan tersara menyenangkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan arahan serta saran-saran yang membangun dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Suprianik, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh staf dan karyawan PLN (Pesero) ULP Kraksaan yang menerima peneliti dengan baik dan bersedia memberikan bantuan kepada peneliti baik dalam hal waktu dan juga tenaga.



Jember, 28 november 2025

Penulis

ABSTRAK

Umi Karimah, Dr. Retna Anggitaningsih, 2025: Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik Dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan Pt Pln (Persero) Ulp Kraksaan

Kata kunci : Subsidi listrik, Kelayakan ekonomi, Tunggakan pelanggan

Tunggakan pembayaran tagihan listrik merupakan salah satu tantangan yang dihadapi PT PLN (Persero), termasuk di ULP Kraksaan. Tunggakan menyebabkan gangguan arus kas, meningkatnya piutang, serta menghambat keberlanjutan operasional perusahaan. Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut ialah subsidi listrik, khususnya bagi pelanggan rumah tangga berdaya rendah. Namun, diperlukan analisis kelayakan ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat finansial dan sosial yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: (1) kelayakan ekonomi dari penerapan subsidi listrik dalam mengurangi tunggakan pelanggan, dan (2) implementasi subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ekonomi penerapan subsidi listrik sebagai strategi pengurangan tunggakan pelanggan serta menilai perannya dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pihak manajemen ULP, observasi lapangan, dan dokumentasi laporan tunggakan pelanggan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan tingkat tunggakan pelanggan, terutama pada kelompok pelanggan berdaya rendah seperti R1, R1M, dan S1. Data menunjukkan penurunan tunggakan dari 16.871 pelanggan pada Januari menjadi 6.730 pelanggan pada Februari setelah penerapan kebijakan subsidi. Selain meningkatkan kepatuhan pembayaran, subsidi juga membantu menjaga stabilitas konsumsi energi dan memperbaiki arus kas PLN. Namun demikian, beberapa kendala ditemukan, seperti tingginya biaya operasional dan keterlambatan kompensasi subsidi dari pemerintah.

Penerapan subsidi listrik pada PT PLN (Persero) ULP Kraksaan dinilai layak secara ekonomi dan mampu berperan dalam menekan angka tunggakan pelanggan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bayar masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga mendukung stabilitas finansial perusahaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi istilah.....	11
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	38
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52

B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	62
A. Gambaran Obyek Penelitian	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	106
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kategori pelanggan.....	67
Tabel 4.2 Tunggalan pelanggan.....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi.....	64
Gambar 4.2 Tunggakan pelanggan.....	72
Gambar 4.3 Arsip data pelanggan.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sektor industri dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi.¹ Ketersediaan listrik yang stabil dan berkelanjutan merupakan syarat utama bagi terciptanya kehidupan modern dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, tanggung jawab penyediaan tenaga listrik berada pada PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memegang peranan strategis dalam menjamin akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat.² Tidak hanya berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan energi, kontribusi PLN juga berkaitan dengan misi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan listrik yang merata dan terjangkau di berbagai wilayah Indonesia³. Dengan demikian, keberlanjutan operasional PLN sangat bergantung pada kondisi finansial perusahaan, terutama melalui pendapatan yang berasal dari pembayaran tagihan listrik oleh pelanggan.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pelanggan dalam membayar tagihan listrik tidak selalu konsisten sehingga menimbulkan masalah tunggakan. Hal ini mendorong perlunya strategi kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan dan kepatuhan

¹ Ravika Mutiara Savitrah Ravika Mutiara Savitrah, Putri Dwi Rahayu, Shella Karunia Putri, Zilvin Nabila, “*Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*” 1 (2025): 543–47.

² Lailiyatus Sa’adah Ahmad Affif, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di PT . PLN (Persero) ULP Kraksaan *Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*” 1 (2025): 627–30.

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Statistik Ketenagalistrikan Nasional*, 2022.

pelanggan dalam melakukan pembayaran. Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan subsidi listrik. Subsidi merupakan bentuk bantuan finansial bagi pelanggan, khususnya yang berpenghasilan rendah, agar kemampuan bayar meningkat. Berdasarkan teori ekonomi publik, subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong ketertiban pembayaran, serta menekan angka gagal bayar. Namun, implementasi subsidi juga menuntut adanya perhitungan ekonomi yang matang karena membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berpotensi menimbulkan tekanan finansial baru apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan pertimbangan sosial, melainkan juga perlu melalui analisis kelayakan ekonomi yang komprehensif.

Analisis kelayakan ekonomi diperlukan untuk menilai apakah subsidi listrik benar-benar memberikan dampak positif bagi PLN, terutama dalam penurunan tunggakan pelanggan. Kelayakan tersebut dapat diukur melalui indikator seperti proyeksi penurunan piutang pelanggan, peningkatan rasio ketertiban pembayaran, stabilitas pendapatan perusahaan, serta kemampuan PLN dalam menyediakan dana subsidi tanpa menimbulkan defisit keuangan⁴. Jika subsidi terbukti mampu meningkatkan pembayaran pelanggan dan mengurangi piutang, maka kebijakan tersebut dapat dinilai layak secara ekonomis serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

digilib.uinkhas.ac.id ⁴ J. Price Gittinger, *Economic Analysis of Agricultural Projects* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2016). has.ac.id

Oleh karena itu, tingkat keberhasilan penerapan subsidi tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, tetapi juga bergantung pada tata kelola internal PLN. Pengelolaan anggaran dan sistem pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi kunci dalam memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara efisien dan akuntabel sehingga beban keuangan perusahaan tidak meningkat secara bermakna. Selain itu, kualitas pelayanan kepada pelanggan juga memegang peranan penting, karena pelayanan yang optimal dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran serta kepuasan pelanggan⁵ sebagai penerima manfaat subsidi. Proses penyusunan anggaran selanjutnya diperlukan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai apakah kebijakan subsidi mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan perusahaan atau justru berpotensi menambah beban finansial. Dengan demikian, kebijakan subsidi harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal perusahaan dan dianalisis berdasarkan data empiris agar tepat sasaran, bermakna, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif akuntansi, pemberian subsidi memiliki dasar etika dalam bentuk tanggung jawab sosial (social responsibility) dan keadilan ekonomi, karena subsidi dipandang sebagai instrumen untuk membantu pihak yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap mampu memenuhi kewajiban finansialnya tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Hal tersebut sejalan dengan nilai moral dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

⁵ Ari Fahimatussyam et al., "Mekanisme Pembiayaan Dan Pelayanan Nasabah Di Bank Syariah" 1 (2025): 775–780.

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa pihak yang memiliki kewajiban penagihan hendaknya memberikan kelonggaran kepada pihak berutang yang sedang berada dalam kesulitan hingga ia mampu membayar kembali, sehingga kebijakan keuangan harus mampu mengakomodasi kondisi ekonomi kelompok rentan. Dalam konteks akuntansi, implementasi subsidi menuntut adanya pengukuran dan pengakuan biaya secara tepat serta pengungkapan (disclosure) yang transparan untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pengalokasian subsidi perlu didasarkan pada pertimbangan materialitas, kemampuan finansial entitas, serta analisis manfaat ekonomi yang dihasilkan melalui peningkatan ketertiban pembayaran dan penurunan piutang macet. Dengan demikian, kebijakan subsidi tetap berada dalam koridor etika profesi akuntansi selama dilaksanakan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan berlandaskan analisis biaya manfaat sesuai kondisi keuangan perusahaan.

Namun dalam praktiknya, permasalahan tunggakan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di PLN ULP Kraksaan. Sebagian pelanggan masih menunda pembayaran tagihan sehingga meningkatkan

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Musthaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-Baqarah 280 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

piutang usaha perusahaan. Kondisi ini berdampak langsung pada aliran kas, stabilitas keuangan, kebutuhan modal operasional, pendanaan pemeliharaan jaringan listrik, hingga kemampuan investasi perusahaan dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan PLN memerlukan strategi yang terstruktur untuk mendorong kepatuhan pembayaran, salah satunya melalui kajian penerapan subsidi listrik.

Sebelum penerapan kebijakan subsidi listrik, kondisi lapangan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang menunggak masih tergolong tinggi. Tunggakan ini didominasi oleh pelanggan rumah tangga berdaya rendah, khususnya pada golongan R1 dan R1M, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar pelanggan pada golongan ini cenderung memiliki pola pembayaran yang kurang disiplin, seperti sering menunda pembayaran hingga melewati jatuh tempo bahkan tidak melakukan pembayaran dalam beberapa periode. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah piutang perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya arus kas operasional PLN. Akibatnya, perusahaan harus menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi listrik dan pelaksanaan kegiatan operasional lainnya.

Dalam pelaksanaannya, subsidi listrik diberikan kepada pelanggan rumah tangga berdaya rendah yang telah terdaftar sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan oleh pemerintah. Penerima subsidi umumnya berasal dari golongan R1 dan R1M, yang dinilai membutuhkan bantuan untuk meringankan beban biaya listrik. Mekanisme pemberian subsidi dilakukan secara langsung melalui pengurangan tagihan listrik, sehingga pelanggan tidak perlu mengajukan permohonan secara khusus. Besaran subsidi yang diterima akan otomatis terpotong pada saat pelanggan melakukan pembayaran, sehingga nominal yang dibayarkan menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.

Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pihak yang menetapkan kebijakan sekaligus menanggung biaya subsidi, sedangkan PT PLN (Persero) bertugas sebagai pelaksana di lapangan. PLN memastikan bahwa subsidi tepat sasaran sesuai dengan data pelanggan yang telah ditentukan, serta mengelola sistem penagihan agar potongan subsidi dapat diterapkan secara otomatis. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah yang terkadang berdampak pada proses administrasi di internal PLN.

Setelah penerapan kebijakan subsidi listrik, terlihat adanya perubahan yang cukup bermakna terutama dalam jumlah pelanggan yang menunggak. Data menunjukkan bahwa jumlah tunggakan mengalami penurunan dari 16.871 pelanggan pada bulan Januari menjadi 6.730 pelanggan pada bulan Februari. Penurunan ini menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan mampu meringankan beban pembayaran pelanggan, khususnya pada golongan rumah tangga berdaya rendah.

Selain itu, perilaku pelanggan juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pelanggan yang sebelumnya sering menunda pembayaran mulai menunjukkan kecenderungan untuk membayar tagihan tepat waktu. Hal ini dipengaruhi oleh besaran tagihan yang menjadi lebih terjangkau, sehingga pelanggan merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajibannya setiap bulan. Dengan kondisi tersebut, tingkat kedisiplinan pembayaran pun meningkat.

Dari sisi stabilitas pembayaran, subsidi listrik turut memberikan dampak positif dengan membuat arus pembayaran menjadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Hal ini secara tidak langsung membantu perusahaan dalam mengelola perencanaan keuangan secara lebih baik. Dampak lainnya juga terlihat pada kondisi keuangan PLN, di mana penurunan jumlah tunggakan berkontribusi pada membaiknya arus kas perusahaan. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan permasalahan, kebijakan ini setidaknya mampu mengurangi tekanan finansial yang sebelumnya cukup dirasakan akibat tingginya angka tunggakan pelanggan.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar pelanggan mengaku merasa terbantu dengan adanya subsidi listrik yang diberikan. Mereka menyampaikan bahwa beban pembayaran listrik menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan. Hal ini terutama dirasakan oleh pelanggan rumah tangga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, yang sebelumnya cukup kesulitan dalam mengatur pengeluaran untuk kebutuhan listrik.

Namun demikian, tidak semua pelanggan menunjukkan perubahan yang sama. Masih terdapat beberapa pelanggan yang tetap menunggak meskipun telah menerima subsidi. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang belum stabil atau adanya prioritas kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Selain itu, ada juga pelanggan yang kurang memiliki kesadaran atau kedisiplinan dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya juga ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah keterlambatan pembaruan data pelanggan penerima subsidi, sehingga ada pelanggan yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan subsidi secara optimal. Selain itu, proses administrasi yang berkaitan dengan pencatatan dan penyesuaian tagihan juga terkadang mengalami hambatan, terutama ketika terjadi keterlambatan pencairan dana subsidi dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan subsidi memberikan dampak positif, masih diperlukan perbaikan dalam aspek teknis dan pengelolaan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan subsidi listrik memberikan dampak positif terhadap penurunan tunggakan pelanggan dan meningkatkan stabilitas pembayaran, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Penerapan Biaya**

Subsidi Listrik dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT PLN

(Persero) ULP Kraksaan” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan subsidi dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan, menurunkan beban piutang, dan memperkuat stabilitas keuangan unit. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan pendapatan yang menyeimbangkan misi sosial PLN dalam menyediakan listrik yang terjangkau dengan keberlanjutan bisnis perusahaan.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis pada perusahaan PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan sesuai dengan judul ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik dalam upaya mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) ULP di wilayah Kraksaan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik dalam upaya mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) ULP di wilayah Kraksaan

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan

D. MANFAAT PRAKTIS

a. Bagi Penulis

1. Diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman terhadap dinamika dan problematika yang dihadapkan oleh peneliti, serta sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang diperoleh selama berada dibangku perkuliahan.
2. Diharapkan mampu menjadi referensi pengembangan ilmu terkait persaingan usaha dan etika bisnis islam secara umum diperlukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) program studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi tambahan dan juga memberikan manfaat yang berharga bagi lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Sebagai materi rujukan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) program studi Akuntansi Syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan juga wawasan bagi pembaca mengenai sebuah aggaran untuk menjaga efisiensi dan stabilitas keuangan. Hal ini bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa dana publik dikelola secara sistematis.

E. DEFINISI ISTILAH

a. Tunggakan pelanggan

Tunggakan pelanggan dapat diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh pelanggan meskipun batas waktu pembayaran telah berakhir. Tunggakan ini muncul akibat penggunaan jasa atau produk tertentu yang seharusnya telah dibayar sesuai ketentuan, namun pelanggan belum melunasi pembayaran tersebut secara penuh. Dalam konteks layanan publik, seperti listrik atau air, tunggakan pelanggan mencerminkan adanya keterlambatan atau ketidakmampuan pelanggan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kelancaran operasional penyedia layanan.⁷

b. PT. PLN

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik, PT PLN tidak

⁷ Muhammad Adriansyah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Kota" 6 (2022): 9067–9076.

yang mudah dipahami. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan Peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, berisi tentang inti atau hasil penelitian, obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari Peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu membuat kesimpulan dari penelitian yang telah terpublikasi (jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya).¹⁰

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurma Oktavia Sari dan Ariusni (2024) dengan judul “Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat”

Bertujuan untuk menganalisis bagaimana subsidi listrik memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, khususnya pada kelompok rumah tangga berdaya listrik rendah di wilayah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan aplikasi STATA. Data penelitian bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 dengan total sampel sebanyak 43.760 kepala rumah tangga. Variabel yang dianalisis meliputi subsidi listrik, status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga, dan lokasi tempat tinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik memiliki pengaruh positif dan bermakna terhadap konsumsi rumah tangga. Rumah tangga penerima subsidi memiliki beban pengeluaran listrik lebih rendah sehingga

¹⁰ Tim Penyusun, *Karyatulis Ilmiah, Jember : Uin Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, Vol. digilib.uinkhas.ac.id 13, 2022. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memungkinkan alokasi pendapatan ke kebutuhan konsumsi lainnya. Sementara itu, variabel status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga, dan lokasi tempat tinggal berpengaruh negatif dan bermakna terhadap konsumsi rumah tangga, yang menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi dan demografi mempengaruhi kemampuan finansial rumah tangga dalam melakukan konsumsi.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi listrik, terutama bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah yang berada di wilayah perdesaan dan belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan listrik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menerapkan pola konsumsi listrik yang lebih hemat agar tingkat keberhasilan kebijakan subsidi semakin optimal.¹¹

2. **Penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Lestari (2022) dengan judul “Kebijakan Subsidi Listrik terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah mengenai subsidi listrik pada masa pandemi serta bagaimana implementasinya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Pananrang serta pihak PLN UP3 Pinrang sebagai pelaksana subsidi.

¹¹ Nurma Oktavia Sari, “Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Provinsi Sumatera Barat,” 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi listrik yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid-19 telah membantu meringankan beban masyarakat, khususnya pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA tidak mampu. Namun implementasinya dinilai belum merata, karena masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang tidak terdata sebagai penerima subsidi. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan subsidi listrik tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya lebih adil dan tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi data, pemutakhiran DTKS, serta sosialisasi kebijakan perlu diperkuat agar subsidi benar-benar mencapai kelompok yang berhak.¹²

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Aiedil Pebri Suwarna dkk. (2025) dengan judul “Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Pengaruhnya terhadap Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus pada PT PLN ULP Kolaka)”**

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran listrik oleh masyarakat, khususnya pelanggan rumah tangga di wilayah kerja PLN ULP Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta

¹² Cahaya Lestari, *Kebijakan Subsidi Listrik terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. IAIN Parepare, 2022

penelaahan dokumen internal PLN sebagai sumber informasi utama mengenai tingkat tunggakan pelanggan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran listrik umumnya terjadi pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak stabil. Kondisi kemiskinan struktural dan ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak menyebabkan sebagian masyarakat harus memilih antara kebutuhan pokok harian atau membayar tagihan listrik. Dampak dari keterlambatan pembayaran ini bukan hanya dirasakan oleh pelanggan, tetapi juga oleh PLN yang mengalami penurunan pendapatan sehingga memengaruhi stabilitas operasional perusahaan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah dan PLN telah menyediakan program subsidi serta bantuan listrik, distribusinya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu antara pemerintah, PLN, dan masyarakat dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran listrik. Upaya seperti pemberdayaan ekonomi, penyaluran subsidi yang tepat sasaran, edukasi mengenai pentingnya pembayaran tepat waktu, serta pengembangan sistem pembayaran digital yang mudah diakses dinilai perlu diperkuat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan dan pelayanan listrik bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.¹³

¹³ Aiedil Pebri Suwarna et al., "Ketimpangan Ekonomi Dan Kemiskinan Dengan Pengaruhnya Terhadap Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus Pada PT PLN

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Firmansyah (2023) dengan judul “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Kepatuhan Pembayaran Listrik Pascabayar”

Bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat pendapatan, beban pengeluaran rumah tangga, serta stabilitas pekerjaan mempengaruhi kedisiplinan pelanggan dalam membayar tagihan listrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 250 responden pelanggan rumah tangga di wilayah Kota Kendari. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui variabel sosial ekonomi yang paling dominan memengaruhi keterlambatan pembayaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bulanan dan tingkat pengeluaran rumah tangga memiliki pengaruh bermakna terhadap kepatuhan pembayaran listrik. Rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap, terutama buruh harian dan pekerja sektor informal, ditemukan sebagai kelompok yang paling rentan terlambat membayar. Ketidakstabilan pendapatan membuat mereka memprioritaskan kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan dibanding tagihan listrik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman pelanggan tentang mekanisme tarif listrik masih rendah, sehingga sebagian masyarakat tidak mampu mengelola pengeluarannya dengan baik. Dampaknya, tingkat tunggakan cenderung meningkat pada periode-periode tertentu.

Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi keuangan berbasis konsumsi energi, penguatan program subsidi tepat sasaran, dan penyediaan skema pembayaran yang lebih fleksibel bagi pelanggan rentan. Peneliti menilai bahwa upaya ini perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan PLN untuk menekan angka tunggakan serta meningkatkan kualitas pelayanan listrik secara berkelanjutan.¹⁴

5. **Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Syalikha (2024) berjudul “Implementasi Subsidi Listrik untuk Mendorong Pencapaian SDGs Tujuan 7”**

Merupakan kajian komprehensif yang berfokus pada bagaimana kebijakan subsidi listrik di Indonesia diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 7 yang menargetkan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi seluruh masyarakat. Menggunakan metode studi literatur kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, data statistik resmi, serta dokumen kebijakan sektor energi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan subsidi listrik di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik telah memberikan kontribusi bermakna dalam meningkatkan akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program subsidi memungkinkan rumah tangga miskin menikmati penerangan dan fasilitas energi dasar yang menunjang

¹⁴ Rahmawati dan Firmansyah, *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Kepatuhan Pembayaran Listrik Pascabayar*, Skripsi, (Politeknik Negeri Manado), 2023.

berbagai aktivitas sosial, ekonomi, serta pendidikan. Selain itu, subsidi listrik terbukti membantu mengurangi tingkat kemiskinan energi, yaitu kondisi ketika suatu rumah tangga tidak mampu memperoleh layanan energi yang memadai untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup, terutama melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta produktivitas ekonomi rumah tangga dan usaha kecil.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan krusial dalam implementasi subsidi listrik. Salah satu masalah utama adalah ketidakakuratan data penerima subsidi, sehingga masih terdapat rumah tangga mampu yang menikmati subsidi, sementara beberapa rumah tangga miskin justru tidak terjangkau oleh program tersebut. Selain itu, inefisiensi penggunaan energi turut menjadi permasalahan karena subsidi yang besar sering kali membuat masyarakat kurang termotivasi untuk melakukan penghematan energi atau menggunakan peralatan berdaya rendah. Penelitian ini juga menyoroti tingginya beban fiskal pemerintah akibat skema subsidi yang luas, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas anggaran negara dalam jangka panjang. Lebih jauh, penelitian Ningsih dan Syalikha (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan subsidi listrik tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga kualitas infrastruktur energi nasional. Di beberapa wilayah terpencil, jaringan listrik belum memadai sehingga keberadaan subsidi saja tidak cukup untuk memastikan akses energi yang optimal. Hal ini menyebabkan

kesenjangan akses listrik antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Peneliti kemudian merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan tingkat keberhasilan subsidi listrik. Pertama, perlu dilakukan pemutakhiran dan validasi data penerima subsidi secara berkala agar program berjalan lebih tepat sasaran. Kedua, diperlukan evaluasi efisiensi energi serta edukasi kepada masyarakat agar subsidi tidak hanya menurunkan biaya listrik, tetapi juga mendorong penggunaan energi yang lebih bijak dan berkelanjutan. Ketiga, untuk wilayah terpencil, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, baik jaringan listrik konvensional maupun energi terbarukan yang harus menjadi prioritas. Selain itu, diperlukan kolaborasi intensif antara pemerintah, PLN, dan masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program subsidi listrik dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran penting subsidi listrik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan. Namun, keberlanjutan program tersebut memerlukan perbaikan sistemik, khususnya terkait ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan energi, dan penguatan infrastruktur energi nasional. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi subsidi yang lebih

bermakna, tepat sasaran, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.¹⁵

6. Penelitian yang dilakukan oleh Josserio A. Lilihata dkk. (2023) dengan judul “Sistem Kendali Jarak Jauh untuk Pemutusan dan Penyambungan kWh Meter dengan Ponsel”

Membahas pengembangan prototipe perangkat yang memungkinkan PT PLN melakukan pemutusan dan penyambungan sambungan listrik pelanggan secara jarak jauh melalui jaringan GSM. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu PT PLN mengatasi permasalahan tunggakan pembayaran listrik serta meningkatkan tingkat keberhasilan proses pemutusan sementara yang selama ini masih dilakukan secara manual dan sering terkendala oleh kondisi lapangan, seperti rumah pelanggan yang kosong, posisi kWh meter yang sulit dijangkau, maupun adanya penolakan dari pelanggan terhadap pemutusan suplai listrik

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa teknologi dengan merancang sebuah sistem berbasis Arduino Uno, modul GSM SIM808, dan relay sebagai komponen utama. Sistem ini memungkinkan petugas PLN untuk mengirimkan perintah melalui SMS dengan format tertentu, seperti “dinyalain” untuk memutus aliran listrik dan “dimatiin” untuk menyambungkan kembali. Selain itu, sistem dilengkapi fitur tambahan berupa pengecekan nilai tegangan, lokasi perangkat melalui GPS, serta pengecekan saldo pulsa pada kartu SIM yang digunakan, sehingga

¹⁵ Vira Kirana Ningsih and Silva Syalikha, “Implementasi Subsidi Listrik Pencapaian SDGs Tujuan 7 Untuk Mendorong” 1, no. 4 (2024): 1–12.

meningkatkan reliabilitas proses monitoring perangkat di lapangan. Seluruh data pembacaan sensor juga dapat divisualisasikan melalui platform *IoT ThingSpeak* sebagai bagian dari dukungan monitoring berbasis cloud

Hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe sistem bekerja dengan baik. Perintah pemutusan dan penyambungan listrik berhasil dijalankan sesuai instruksi SMS yang dikirimkan. Relay merespons secara akurat dan status sistem dapat dikonfirmasi melalui pesan balik maupun melalui dashboard *ThingSpeak*. Fitur pengecekan tegangan serta lokasi juga berfungsi dengan baik, sehingga memberikan informasi akurat mengenai kondisi perangkat di lapangan. Temuan ini membuktikan bahwa sistem kendali jarak jauh dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi jumlah pelanggan penunggak sekaligus mengatasi kendala teknis dalam proses pemutusan manual yang sering tidak bermakna

Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi berbasis *Internet of Things* (IoT) dan sistem kendali GSM berpotensi besar diterapkan oleh PT PLN untuk meningkatkan efisiensi penanganan tunggakan listrik, mengoptimalkan monitoring perangkat APP, serta mempercepat proses pengambilan keputusan operasional di lapangan. Sistem yang dikembangkan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, baik untuk integrasi dengan sistem pembayaran digital maupun pengembangan fitur otomatisasi yang lebih canggih.¹⁶

digilib.uinkhas.ac.id ¹⁶ "Sistem Kendali Jarak Jauh untuk Pemutusan dan Penyambungan KWh Meter dengan Ponsel," 12, no. 2 (2023): 138–143. has.ac.id

7. **Penelitian yang dilakukan oleh Bobi Heri Yanto dan Yuhandri Yunus (2021) dengan judul “Evaluasi Penentuan Kelayakan Pemberian Subsidi Listrik dengan Metode *Multifactor Evaluation Process* (MFEP)”**

Bertujuan untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan yang mampu membantu PT Haleyora Power dalam menentukan kelayakan penerima subsidi listrik secara lebih akurat dan tepat sasaran. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya temuan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, di mana masyarakat mampu justru ikut menerima subsidi akibat proses verifikasi manual dan ketiadaan kriteria yang terstruktur dalam penentuan penerima subsidi. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi anggaran serta ketidaktepatan penyaluran manfaat subsidi kepada masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama

Penelitian ini menggunakan metode *Multifactor Evaluation Process* (MFEP) untuk memberikan bobot pada setiap kriteria kelayakan calon penerima subsidi, seperti pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, kepemilikan rumah, jenis kendaraan, luas bangunan, dan sumber air minum. Data penelitian terdiri dari 20 calon penerima subsidi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak PT Haleyora Power. Sistem pendukung keputusan kemudian digunakan untuk menghitung nilai evaluasi pada masing-masing calon berdasarkan bobot faktor dan subfaktor yang telah ditentukan. Hasil perhitungan tersebut dilakukan baik secara manual maupun menggunakan sistem, dan keduanya

menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 100%, menandakan bahwa metode MFEP dapat secara konsisten menghasilkan keputusan yang akurat mengenai kelayakan penerima subsidi listrik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 calon penerima subsidi listrik, sebanyak 11 orang dinyatakan eligible dan 9 orang non-eligible berdasarkan nilai total evaluasi yang dihasilkan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa metode MFEP mampu membantu proses penentuan penerima subsidi secara lebih objektif, terukur, dan efisien. Dengan adanya sistem penunjang keputusan, PT Haleyora Power dapat mengurangi kesalahan penyaluran subsidi kepada masyarakat mampu dan mengoptimalkan anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya digitalisasi proses verifikasi subsidi agar tidak lagi bergantung pada penilaian manual yang rentan bias dan kesalahan administratif

Penelitian ini berkontribusi besar dalam memberikan dasar metodologis bagi evaluasi kelayakan subsidi listrik pada unit-unit PLN lainnya. Temuannya relevan dengan isu nasional mengenai ketepatan sasaran subsidi energi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya pengembangan kriteria standar serta sistem informasi berbasis data untuk memastikan subsidi listrik benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Rekomendasi yang diajukan meliputi perlunya penerapan SPK MFEP secara lebih luas, peningkatan kualitas basis data pelanggan,

serta integrasi sistem penilaian kelayakan subsidi dengan data sosial ekonomi pemerintah untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi.¹⁷

8. **Penelitian yang dilakukan oleh Raditya Hari Nugraha, Diana Purwitasari, dan Agus Budi Raharjo (2022) dengan judul “K-Means dan XGBoost untuk Analisis Perilaku Pembayaran Rekening Listrik Pelanggan (Studi Kasus: PLN ULP Panakkukang)”**

Bertujuan untuk menganalisis karakteristik perilaku pembayaran listrik pelanggan serta mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berpotensi menunggak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya percepatan arus pendapatan piutang rekening listrik untuk menjaga stabilitas kas perusahaan dan mendukung keberlanjutan operasional dan investasi aset PLN. Peneliti menekankan bahwa banyak faktor memengaruhi perilaku pembayaran pelanggan, seperti lokasi pelanggan, besaran tagihan, ketersediaan fasilitas payment point, tingkat pemadaman listrik yang dialami, serta kesadaran pelanggan terhadap batas waktu pembayaran rekening listrik

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis machine learning dengan mengombinasikan metode *K-Means Clustering* dan algoritma klasifikasi *XGBoost*. Data penelitian mencakup 58.086 pelanggan ULP Panakkukang selama enam bulan (April–September 2021), yang terdiri atas data histori pembayaran, data induk langganan, data pemakaian energi, serta data frekuensi padam. Teknik pemrosesan data

¹⁷ Bobi Heri Yanto dan Yuhandri Yunus, “Evaluasi Penentuan Kelayakan Pemberian Subsidi Listrik dengan Metode MFEP,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 3 (2021): 2–4.

yang digunakan meliputi cleaning, filtering, penghapusan outlier, principal component analysis (PCA), serta penggabungan beberapa sumber data primer. Penggunaan PCA diperlukan karena variabel jarak pelanggan ke PPOB memiliki multikolinieritas yang sangat tinggi sehingga membutuhkan reduksi dimensi untuk menghasilkan struktur data yang lebih stabil dan akurat dalam analisis klasterisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model klaster menghasilkan tiga kelompok utama pelanggan, yaitu pelanggan yang cenderung lancar membayar, pelanggan yang cenderung terlambat tetapi masih dalam bulan berjalan, serta pelanggan yang berpotensi tinggi menunggak melewati batas bulan. Metode klasifikasi *XGBoost* digunakan untuk memprediksi potensi keterlambatan pelanggan, dengan variabel penting seperti tanggal pembayaran, kategori subsidi, biaya keterlambatan, jam nyala, dan jumlah pemadaman. Melalui proses *tuning hyperparameter* menggunakan teknik Bayesian Optimization, model klasifikasi mencapai tingkat akurasi sebesar 89,27% dengan nilai AUC mencapai 0,923, yang merupakan performa terbaik dibandingkan metode pembandingan seperti *Gradient Boosting* dan *LDA-XGBoost*. Temuan ini membuktikan bahwa kombinasi *K-Means* dan *XGBoost* sangat bermakna dalam memprediksi pelanggan yang berpotensi menunggak

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pelanggan kategori subsidi dan pelanggan yang sering mengalami gangguan listrik memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menunggak. Sebaran geografis

pelanggan menunjukkan adanya wilayah-wilayah prioritas yang membutuhkan peningkatan fasilitas PPOB maupun program intensif sosialisasi pembayaran tepat waktu. Selain berfungsi sebagai alat prediksi, model ini memberikan dasar strategis bagi PLN dalam menetapkan lokasi optimal pembangunan PPOB baru serta melakukan penagihan yang lebih terarah untuk menekan angka tunggakan

Penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi analitik dan machine learning dalam pengelolaan piutang PLN. Rekomendasi yang diberika mencakup peningkatan kualitas data pelanggan, penguatan sistem digital dalam memonitor perilaku pembayaran, serta pengembangan strategi penagihan berbasis kluster pelanggan. Peneliti menilai bahwa model ini berpotensi digunakan secara lebih luas oleh unit-unit PLN lain untuk memudahkan pemetaan risiko tunggakan dan mendukung percepatan *cash-in* perusahaan secara berkelanjutan.¹⁸

9. Penelitian yang dilakukan oleh Buana Vidi dan Amrita Nugraheni Saraswaty (2025) dengan judul “Analisis Hubungan Subsidi dan Non-Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Listrik Rumah Tangga (Studi Kasus: Kabupaten Badung)”

Berfokus pada pengujian pengaruh subsidi listrik, pendapatan rumah tangga, serta daya listrik terhadap tingkat konsumsi listrik rumah tangga di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan subsidi listrik pemerintah pada tahun 2020 bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA

¹⁸ Raditya Hari Nugraha, Diana Purwitasari, and Agus Budi Raharjo, “K-Means Dan Xgboost Untuk Analisis Perilaku Pembayaran Rekening Listrik Pelanggan (Studi Kasus : Pln Ulp Panakkukang)” 20 (2022): 84–98.

selama masa pandemi COVID-19, yang diduga memicu peningkatan konsumsi listrik sekaligus potensi terjadinya moral hazard pada sebagian pelanggan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 rumah tangga, serta diolah menggunakan metode regresi logistik. Variabel yang diuji meliputi subsidi (X1), pendapatan rumah tangga (X2), daya listrik (X3), dan konsumsi listrik rumah tangga (Y). Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh masing-masing variabel serta melihat apakah terdapat moral hazard akibat kebijakan subsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik, pendapatan rumah tangga, dan daya listrik secara simultan bermakna terhadap konsumsi listrik rumah tangga. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga terbukti memiliki pengaruh positif dan bermakna terhadap peningkatan konsumsi listrik. Penelitian ini juga menemukan adanya 24% rumah tangga yang melakukan moral hazard, yaitu menggunakan listrik secara berlebihan karena tidak merasakan biaya penuh akibat adanya subsidi. Perilaku ini ditandai dengan konsumsi listrik yang melebihi batas rata-rata pemakaian yang ditetapkan PLN.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan subsidi listrik di masa pandemi berhasil meringankan beban masyarakat, namun juga menimbulkan dampak sampingan berupa peningkatan konsumsi yang tidak efisien. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah

untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran subsidi serta memperkuat pengawasan agar potensi moral hazard dapat diminimalkan pada masa mendatang.¹⁹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Arika Putri (2022) dengan judul “Implementasi Teknis Pengendalian Tunggakan Pelanggan Rekening Listrik Pascabayar di PT PLN (Persero) ULP Denpasar”

Membahas upaya teknis yang dilakukan PT PLN dalam mengendalikan tunggakan pembayaran listrik pelanggan pascabayar yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan saldo piutang yang semakin besar akibat keterlambatan pembayaran tagihan, yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan serta tingkat keberhasilan operasional Unit Layanan Pelanggan (ULP) Denpasar. Dalam konteks tersebut, pengendalian tunggakan menjadi salah satu aspek krusial agar PLN dapat menjaga kesehatan keuangan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta memastikan keberlangsungan operasional distribusi energi listrik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara dengan pegawai bagian energi dan pelayanan pelanggan, serta studi dokumentasi terhadap arsip resmi PLN seperti data jumlah pelanggan menunggak, data tunggakan, SPJBTL, surat pemutusan sementara, dan dokumentasi proses pemutusan sambungan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga bentuk

¹⁹ Buana Vidi et al., “Analisis Hubungan Subsidi Dan Non-Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Listrik Rumah Tangga (Studi Kasus : Kabupaten Badung)” 4, no. 1 (2025): 467–77.

pengendalian utama, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif, yang secara keseluruhan membentuk alur teknis pengendalian tunggakan di ULP Denpasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknis pengendalian tunggakan sudah berjalan cukup baik melalui sejumlah tindakan preventif seperti penyebaran invoice oleh petugas billing man, pengiriman SMS broadcast untuk pengingat pembayaran, sosialisasi penggunaan aplikasi PLN Mobile, serta program migrasi ke layanan listrik prabayar sebagai upaya mengurangi risiko tunggakan di kemudian hari. Di tahap detektif, PLN melakukan pemeriksaan lapangan dengan mendatangi langsung rumah pelanggan untuk memastikan kondisi sambungan serta memberikan informasi tambahan terkait tunggakan. Sementara pada tahap korektif, PLN menerapkan prosedur pemutusan sementara bagi pelanggan yang terlambat membayar satu bulan, pengawasan pasca-pemutusan, hingga pembongkaran sambungan bagi pelanggan yang menunggak hingga tiga bulan berturut-turut.

Hasil analisis juga mengungkap bahwa implementasi teknis tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Kendala yang paling sering terjadi adalah rumah pelanggan dalam keadaan kosong saat petugas datang, kebiasaan pelanggan membayar tagihan menjelang akhir bulan, ketidakpatuhan terhadap perjanjian kerja sama pembayaran, serta kurang tegasnya petugas penagihan dalam menghadapi pelanggan yang tidak kooperatif. Selain itu, koordinasi dengan mitra pemutusan dan

penyambungan juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi teknis di lapangan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian tunggakan memerlukan kombinasi strategi preventif, detektif, dan korektif yang dilaksanakan secara konsisten, serta peningkatan kualitas komunikasi antara PLN dan pelanggan. Penelitian ini juga memberikan pijakan bagi pengembangan sistem penagihan yang lebih modern, termasuk pemanfaatan aplikasi digital seperti *PLN Mobile* dan peningkatan layanan prabayar untuk meminimalkan risiko tunggakan. Kajian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait pengembangan sistem otomatisasi penagihan atau penerapan teknologi digital dalam proses pemutusan dan penyambungan listrik di masa depan.²⁰

Tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan

No	Nama, tahun, judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurma Oktavia Sari & Ariusni, 2024, "Pengaruh Subsidi Listrik terhadap Konsumsi	Subsidi listrik terbukti berpengaruh positif dan bermakna terhadap konsumsi rumah	Penelitian ini fokus pada pengaruh subsidi terhadap pola konsumsi, bukan pada kelayakan ekonomi subsidi dan upaya	Sama-sama membahas subsidi listrik sebagai kebijakan pemerintah yang

²⁰ Jurusan Administrasi Niaga and Politeknik Negeri Bali, "Implementasi Teknis Pengendalian Tunggakan Pelanggan Rekening Listrik Pascabayar Di Pt Pln (Persero) Ulp Denpasar," 2022.

	Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat”	<p>tangga. Rumah tangga miskin yang menerima subsidi memiliki beban pembayaran listrik lebih rendah, sehingga konsumsi energi dan kebutuhan rumah tangga lainnya meningkat.</p> <p>Variabel lokasi, jumlah anggota keluarga, dan pekerjaan kepala keluarga juga memengaruhi kemampuan konsumsi.</p>	<p>mengurangi tunggakan seperti penelitian Anda. Tidak membahas piutang, risiko keuangan PLN, maupun tingkat keberhasilan kebijakan untuk mengurangi gagal bayar.</p>	<p>berdampak pada kelompok rumah tangga berdaya rendah. Sama-sama menyinggung kelompok rentan ekonomi, yaitu rumah tangga kurang mampu.</p>
2.	Cahaya Lestari, 2022, “Kebijakan Subsidi Listrik terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Pinrang	<p>Subsidi listrik di masa pandemi Covid-19 sangat membantu pelanggan 450VA dan 900VA tidak mampu. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi</p>	<p>Penelitian ini fokus pada masa pandemi dan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian Anda menganalisis kelayakan ekonomi subsidi sebagai strategi menekan tunggakan</p>	<p>Sama-sama menilai fungsi subsidi listrik dalam membantu masyarakat dan bagaimana subsidi menjadi</p>

	(Analisis Hukum Ekonomi Islam)”	kendala data, banyak masyarakat miskin tidak terdaftar pada DTKS. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, subsidi ini sesuai prinsip keadilan, keringanan, dan kemaslahatan, meskipun pelaksanaannya belum optimal.	pembayaran.	instrumen keringanan beban pembayaran.
3.	Aiedil Pebri Suwarna, Alia Nova, Annisa Nurjanna, dan Adil Putra Artaman, 2025, “Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Pengaruhnya terhadap Keterlambatan Pembayaran Listrik (Studi	Tunggakan listrik disebabkan rendahnya pendapatan, ketidakstabilan ekonomi, dan pekerjaan informal. Pelanggan miskin sering memilih kebutuhan primer daripada membayar listrik. Dampaknya, PLN mengalami penurunan	Penelitian ini fokus pada sebab tunggakan, bukan pada analisis kelayakan subsidi seperti penelitian Anda. Tidak menilai apakah subsidi layak diterapkan untuk mengurangi tunggakan.	Sama-sama meneliti tunggakan listrik dan hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Relevan dengan aspek kepatuhan pembayaran pelanggan.

	Kasus PT PLN ULP Kolaka)”	pendapatan dan gangguan arus kas. Subsidi sudah ada, tetapi belum tepat sasaran sehingga tidak cukup mengatasi tunggakan.		
4.	Rahmawati & Firmansyah, 2023, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Kepatuhan Pembayaran Listrik Pascabayar”	Tingkat pendapatan, pengeluaran rumah tangga, dan stabilitas pekerjaan memengaruhi kepatuhan pembayaran. Kelompok buruh dan pekerja harian paling rentan terlambat membayar. Kurangnya pemahaman tarif listrik membuat masyarakat tidak mampu mengatur konsumsi.	Penelitian tersebut tidak menilai subsidi sebagai instrumen pengendalian tunggakan, sedangkan penelitian Anda berfokus pada kelayakan ekonomi subsidi.	Sama-sama membahas kepatuhan pembayaran dan faktor yang memengaruhi tunggakan pelanggan.
5.	Vira Kirana	Subsidi listrik	Penelitian ini fokus	Sama-sama

	Ningsih & Silva Syalikha, 2024, "Implementasi Subsidi Listrik untuk Mendorong Pencapaian SDGs Tujuan 7"	meningkatkan akses energi dan menurunkan kemiskinan energi. Namun hambatan seperti ketidaktepatan sasaran, beban fiskal tinggi, dan inefisiensi penggunaan energi masih terjadi. Peningkatan akurasi data dan edukasi energi diperlukan agar subsidi bermakna.	pada SDGs dan pemerataan energi, bukan pada kelayakan ekonomi subsidi untuk mengurangi tunggakan seperti penelitian Anda.	membahas subsidi listrik, tingkat keberhasilan kebijakan, dan dampaknya pada masyarakat berpenghasilan rendah.
6.	Josserio A. Lilihata, Hanny H. Tumbelaka, Handry Khoswanto, 2023, "Sistem Kendali Jarak Jauh untuk Pemutusan dan Penyambungan kWh Meter dengan	Sistem IoT memungkinkan PLN memutuskan dan menyambung listrik pelanggan secara jarak jauh melalui SMS. Teknologi ini bermakna untuk menekan tunggakan dan mempercepat tindakan	Penelitian ini adalah penelitian teknologi rekayasa, bukan kebijakan subsidi. Anda meneliti kelayakan ekonomi subsidi sebagai alat pengendalian tunggakan.	Sama-sama tujuan akhirnya adalah mengurangi tunggakan pelanggan PLN.

	Ponsel”	pemutusan tanpa kendala lapangan.		
7.	Bobi Heri Yanto & Yuhandri Yunus, 2021, “Evaluasi Penentuan Kelayakan Pemberian Subsidi Listrik dengan Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP)”	Metode MFEP membantu menentukan penerima subsidi dengan mempertimbangan pekerjaan, pendapatan, dan kondisi ekonomi secara lebih objektif.	Penelitian tersebut menilai bagaimana memilih penerima subsidi, sedangkan penelitian Anda menilai apakah subsidi layak dijalankan untuk mengurangi tunggakan.	Sama-sama mengangkat isu ketepatan sasaran pemberian subsidi.
8.	Raditya H. Nugraha dkk, 2022, “K-Means dan XGBoost untuk Analisis Perilaku Pembayaran Listrik”	Model berhasil mengelompokkan pelanggan berisiko menunggak dan memprediksi perilaku pembayaran dengan akurasi tinggi.	Pendekatan mereka berbasis machine learning, sedangkan penelitian Anda berbasis analisis kualitatif mengenai kelayakan subsidi.	Sama-sama terkait pengendalian tunggakan dan perilaku pelanggan.
9.	Buana Vidi & Amrita N. Saraswaty,	Subsidi meningkatkan konsumsi listrik	Mereka fokus pada perubahan konsumsi,	Menjelaskan bagaimana subsidi

	2025, “Subsidi vs Non-Subsidi dan Pengaruhnya terhadap Konsumsi”	secara bermakna, namun juga menyebabkan beberapa pelanggan menjadi kurang efisien dalam penggunaan listrik.	sedangkan Anda fokus pada pengaruh subsidi terhadap tunggakan dan kelayakan finansial PLN.	memengaruhi perilaku pelanggan.
10.	Kadek Arika Putri, 2022, <i>“Implementasi Pengendalian Tunggakan Pelanggan di ULP Denpasar”</i>	Sistem notifikasi, kunjungan lapangan, dan keputusan listrik bermakna tetapi terkendala keterbatasan SDM dan kondisi lapangan.	Penelitian ini fokus pada mekanisme penagihan di lapangan, sedangkan Anda pada subsidi sebagai strategi finansial untuk mencegah tunggakan terjadi.	Sama-sama membahas upaya mengurangi tunggakan.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan terkait teori-teori sebagai perspektif awal penelitian dilakukan. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam mengingat tujuan penelitian dan pertanyaan yang telah diajukan, selanjutnya mengembangkan wawasan penelitian ke dalam masalah yang ada dalam penelitian²¹

²¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108.

1. Kelayakan ekonomi

Studi kelayakan merupakan suatu proses evaluasi komprehensif yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek dapat dijalankan dengan tingkat keberhasilan yang memadai. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kelayakan proyek dari berbagai sudut pandang. Tujuan utamanya adalah untuk menilai manfaat dan potensi kerugian baik pada kegiatan yang tengah berlangsung maupun yang akan dilaksanakan, termasuk pengaruhnya terhadap lingkungan sosial, kebutuhan sumber daya, dan prospek keberlanjutan usaha. Dalam praktiknya, terdapat dua prinsip dasar yang menjadi fokus utama dalam studi kelayakan, yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta nilai dan manfaat yang diperoleh. Kedua aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah sebuah proyek memiliki prospek yang menguntungkan atau justru berisiko tinggi.²²

Sebuah studi kelayakan yang tersusun dengan baik harus mencakup penjabaran mendasar mengenai konsep usaha, gambaran produk atau layanan yang akan ditawarkan, hingga penilaian finansial yang memuat estimasi pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, studi kelayakan juga meliputi aspek operasional dan manajerial, strategi pemasaran dan analisis pasar, kebutuhan hukum yang harus dipenuhi, serta proyeksi biaya dan pendapatan jangka panjang. Semua unsur ini dihimpun untuk memberikan gambaran menyeluruh sebelum proyek dilakukan. Karena itu, studi

²² S.K.M. S.K.M., M.M., M.P.I.A. Dr. E. Yochanan, S.O.T.M. Dr. dr. Markus Wibowo, dan S.H., M.H. Rahmat Hidayat, *Studi Kelayakan Rumah Sakit Khusus Menjadi Rumah Sakit Umum* (Global Kreatif Media, 2025).

kelayakan biasanya disusun sebelum tahap pengembangan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengambil keputusan memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Objektivitas menjadi unsur penting dalam penyusunannya, karena laporan ini akan menjadi acuan bagi calon investor, pemilik usaha, maupun lembaga keuangan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Di samping itu, studi kelayakan juga mempertimbangkan kendala potensial, batasan kerja, serta persyaratan proyek seperti waktu pelaksanaan, estimasi biaya, dan standar kualitas yang harus dipenuhi agar proyek dapat berjalan optimal.²³

Salah satu komponen krusial dalam studi kelayakan adalah analisis ekonomi, karena aspek finansial merupakan indikator paling nyata mengenai layak atau tidaknya suatu proyek dijalankan. Analisis ekonomi berfungsi untuk menghitung seluruh potensi biaya dan manfaat yang mungkin timbul, serta mengukur seberapa besar tingkat pengembalian investasi yang dapat diharapkan. Pendekatan ini membantu pemangku kepentingan dalam menilai apakah proyek tersebut memiliki dampak keuangan yang positif atau justru menimbulkan risiko kerugian. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa proyek memiliki prospek keuntungan yang sesuai dan return on investment (ROI) yang memadai, maka proyek dapat dilanjutkan ke tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan. Sebaliknya, jika perhitungan finansial menunjukkan bahwa proyek kurang menguntungkan atau memiliki risiko yang tinggi, maka keputusan pembatalan atau

peninjauan ulang perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Beberapa bentuk analisis yang digunakan dalam studi kelayakan ekonomi meliputi:

- a. Analisis biaya, yaitu proses mengidentifikasi seluruh biaya yang diperlukan sejak awal perencanaan hingga tahap operasional proyek. Ini mencakup biaya tenaga kerja, pengadaan bahan baku, pembelian atau penyewaan peralatan, biaya administrasi, serta biaya pemeliharaan yang berkelanjutan. Semakin detail analisis biaya, semakin akurat gambaran finansial proyek yang diperoleh.
- b. Analisis manfaat, yakni penilaian terhadap berbagai keuntungan finansial yang dapat dihasilkan proyek. Manfaat ini dapat berupa peningkatan pendapatan, penghematan biaya operasional, peningkatan efisiensi, atau manfaat lain yang dapat dihitung dalam bentuk moneter. Analisis manfaat membantu menilai apakah proyek memberikan nilai tambah bagi organisasi.
- c. Perhitungan ROI, yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh dibandingkan modal yang diinvestasikan. ROI digunakan sebagai indikator sederhana namun bermakna untuk menilai kelayakan finansial. Proyek dengan ROI tinggi umumnya lebih menarik bagi investor.
- d. Analisis *break-even*, yaitu penetapan titik impas ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengetahui kapan proyek mulai menghasilkan keuntungan.

Informasi mengenai titik impas sangat penting dalam perencanaan keuangan, terutama untuk mengukur risiko jangka pendek.

- e. Perhitungan NPV, yang menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto tertentu. NPV positif menandakan bahwa proyek memberikan nilai tambah bagi organisasi karena arus kas masuk lebih tinggi dibandingkan arus kas keluar setelah dihitung berdasarkan nilai waktu uang.
- f. Perhitungan IRR, yakni tingkat pengembalian investasi yang akan diperoleh proyek selama masa manfaatnya. IRR yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum menunjukkan bahwa proyek tersebut layak secara finansial.
- g. Evaluasi risiko keuangan, yaitu analisis terhadap berbagai ketidakpastian seperti fluktuasi harga, perubahan permintaan, kenaikan biaya operasional, atau ketergantungan pada faktor eksternal lainnya. Uji sensitivitas juga digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan variabel tertentu mempengaruhi hasil keuangan proyek.²⁴

Secara keseluruhan, studi kelayakan merupakan rangkaian penilaian menyeluruh yang melibatkan aspek teknis, hukum, ekonomi, pasar, sosial, serta faktor lingkungan dalam menentukan apakah suatu proyek dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal. Dengan adanya studi kelayakan, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang

terukur berdasarkan analisis yang mendalam sehingga proyek tidak hanya layak secara teori, tetapi juga realistis dan berpotensi sukses ketika diterapkan di lapangan.

Konsep ini selaras dengan panduan analisis kelayakan ekonomi dalam penyediaan infrastruktur, di mana kelayakan ekonomi ditentukan berdasarkan perbandingan antara manfaat ekonomi dan biaya ekonomi yang muncul akibat proyek. Suatu proyek dinilai layak apabila manfaat ekonomi bersih bernilai positif, yaitu manfaat ekonomi lebih besar daripada biaya ekonominya. Analisis kelayakan ekonomi dilakukan menggunakan metode Analisis Biaya-Manfaat (ABM)²⁵ dengan contoh rumus:

Rumus ABM:

$$\text{Manfaat Ekonomi Bersih} = \text{Manfaat Ekonomi} - \text{Biaya Ekonomi} > 0$$

Tahapan utamanya seperti pengumpulan data teknis dan finansial, koreksi fiskal, konversi harga finansial ke *shadow price*, penilaian manfaat berdasarkan *willingness to pay* atau *avoided cost*, identifikasi dampak bagi pemangku kepentingan, pengkuantifikasian eksternalitas, dan perhitungan *Economic Net Present Value* (ENPV) serta *Economic Rate of Return* (ERR) menggunakan social discount rate. Proyek dapat dinyatakan layak apabila ENPV positif dan ERR melebihi social discount rate, serta ketika risiko utama dapat dimitigasi melalui analisis sensitivitas dan analisis skenario. Dengan demikian, kelayakan ekonomi memastikan bahwa penyediaan

²⁵ Titik Muzayyanah dan M. Daud Rhosyidy, “Kelayakan Ekonomi atas Implementasi Subsidi Listrik untuk Mengurangi Tunggakan pada Pelanggan PT PLN Kraksaan,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 403–411.

infrastruktur atau suatu kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai prinsip keadilan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam pembangunan.²⁶

Kelayakan ekonomi sejalan dengan prinsip keadilan dan ihsan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi, harus memberikan kemaslahatan serta menghindarkan masyarakat dari ketidakadilan. QS. An-Nahl ayat 90:

وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan.”²⁷

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk penyediaan subsidi listrik, harus berlandaskan asas keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan sosial. Penerapan subsidi listrik yang tepat sasaran merupakan wujud keadilan distributif sekaligus bentuk ihsan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat rentan serta mendukung keberlanjutan sistem pelayanan umum.

Dalam konteks penelitian berjudul “*Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT*”

²⁶ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, *Panduan Analisis Kelayakan Ekonomi* (tanpa tahun).

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Musthaf Al-Qur’an, 2019, QS. An-Nahl:90.

PLN (Persero) ULP Kraksaan”, studi kelayakan umum berperan sebagai landasan teoritis untuk menilai sejauh mana kebijakan subsidi listrik layak diterapkan dari aspek ekonomi. Melalui pendekatan kelayakan yang mempertimbangkan biaya, manfaat, risiko, dan proyeksi finansial, penelitian ini menilai apakah subsidi listrik mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi PLN sekaligus meringankan beban pelanggan berdaya rendah sehingga tingkat tunggakan dapat ditekan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip kelayakan seperti analisis biaya-manfaat, ROI, NPV, IRR, hingga evaluasi risiko, penelitian ini tidak hanya menilai tingkat keberhasilan subsidi dari sisi pelanggan, tetapi juga menguji keberlanjutan program dari perspektif perusahaan. Dengan demikian, teori kelayakan umum menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi listrik tidak hanya layak secara teoritis, tetapi juga memberikan dampak finansial positif, mendukung stabilitas arus kas PLN, serta berkontribusi pada peningkatan ketertiban pembayaran pelanggan di wilayah ULP Kraksaan.

2. Subsidi listrik

Subsidi adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau masyarakat yang ditujukan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan produksi atau konsumsi barang dalam jumlah yang lebih besar atau dengan harga yang lebih terjangkau. Dari perspektif ekonomi, tujuan dari subsidi adalah untuk menurunkan harga atau meningkatkan produksi agar barang atau jasa tersebut bisa diakses oleh lebih banyak orang. Subsidi merupakan salah satu jenis pengeluaran

pemerintah yang sering disebut sebagai pajak negatif, karena memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan nyata bagi penerima subsidi melalui penurunan harga jual barang atau jasa yang mereka gunakan. Ada dua jenis subsidi, yaitu subsidi berupa uang (*cash transfer*) dan subsidi berupa barang atau layanan (*in-kind subsidy*).

Menurut Mike Crosetti (1999) dalam Kodoatie (2002), subsidi dipahami sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kelompok konsumen tertentu agar dapat membeli produk atau jasa di bawah harga pasar, atau untuk membantu produsen agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari apa yang dibayar oleh konsumen melalui dukungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu, subsidi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi dan kebijakan untuk pemerataan kesejahteraan.

Dalam konteks kelistrikan di Indonesia, subsidi listrik adalah dukungan keuangan yang disediakan oleh pemerintah untuk PT PLN (Persero) dan dihitung berdasarkan selisih antara biaya penyediaan listrik dan tarif yang dikenakan kepada pelanggan rumah tangga tertentu. Subsidi ini fokus pada pelanggan berdaya rendah, seperti rumah tangga dengan daya 450 VA dan beberapa pelanggan 900 VA yang telah terverifikasi sebagai kelompok miskin atau tidak mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuan utama dari subsidi listrik ini adalah untuk memastikan kelompok masyarakat tersebut tetap dapat mengakses listrik dengan harga yang terjangkau. Dengan subsidi ini, pemerintah

berharap penyediaan listrik dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk menikmati manfaat energi listrik sebagai kebutuhan pokok.²⁸

Subsidi listrik juga memiliki peran yang penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan menyediakan akses energi yang terjangkau, subsidi listrik berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan Tanpa Kemiskinan, Energi Terjangkau dan Bersih, serta Pengurangan Ketidaksetaraan. Akses listrik yang terjangkau memungkinkan masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, dan peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga.

Namun, meskipun memiliki manfaat sosial dan ekonomi, subsidi listrik juga memiliki potensi dampak negatif. Salah satunya adalah munculnya distorsi dalam pilihan sumber energi ketika tarif yang dibayarkan pelanggan jauh lebih rendah dari biaya penyediaan. Hal ini bisa membuat sektor kelistrikan menjadi kurang menarik bagi investor swasta karena bergantung pada dukungan dana pemerintah. Selain itu, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat meningkatkan beban fiskal pemerintah dan berisiko mengurangi efisiensi dalam pengalokasian sumber daya energi nasional.

Untuk memastikan subsidi listrik dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan pengelolaan yang menerapkan prinsip

²⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tanpa tahun).

transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, kemudahan implementasi, serta integrasi dalam kerangka reformasi kebijakan energi secara menyeluruh. Dengan pengelolaan yang baik, tujuan subsidi listrik dapat tercapai.

- a. Meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang kurang mampu.

Listrik dianggap sebagai kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan produktivitas.

- b. Menurunkan beban biaya bagi keluarga berpendapatan rendah

Bantuan keuangan berfungsi untuk meredakan tekanan ekonomi, sehingga individu tidak perlu memilih antara kebutuhan energi dan kebutuhan dasar lainnya.

- c. Menjamin distribusi akses energi yang merata

Pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terasing, bisa mendapatkan energi dengan adil.²⁹

3. Dampak kebijakan subsidi listrik bagi PLN

- a. Mengurangi risiko tunggakan pelanggan, karena tarif lebih terjangkau sehingga pelanggan berdaya rendah lebih mampu membayar tagihan tepat waktu.

Subsidi listrik menurunkan besaran tarif atau biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan, khususnya bagi rumah tangga dengan daya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA. Dengan tarif yang lebih

²⁹ Widarma and Kumala, "Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Pengguna Listrik Subsidi Dan Nonsubsidi Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani (Studi Kasus : PT : PLN Tanjung Balai)."

terjangkau, pelanggan yang sebelumnya kesulitan membayar tagihan karena keterbatasan ekonomi kini memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk melunasi tagihan tepat waktu. Kondisi ini secara langsung menurunkan jumlah pelanggan yang menunggak, sehingga risiko terjadinya piutang macet atau akumulasi tunggakan menjadi lebih kecil.

Selain itu, pengurangan risiko tunggakan tidak hanya bermanfaat bagi pelanggan, tetapi juga bagi perusahaan penyedia layanan listrik. Dengan arus pembayaran yang lebih stabil dan tepat waktu, PLN dapat menjaga kelangsungan operasional, merencanakan anggaran dengan lebih bermakna, dan melakukan pemeliharaan jaringan secara teratur tanpa terganggu oleh fluktuasi pendapatan akibat tunggakan. Dengan demikian, subsidi listrik berperan sebagai instrumen yang mendorong kepatuhan pembayaran pelanggan sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

- b. Membantu menjaga stabilitas konsumsi listrik, karena pelanggan tetap dapat mempertahankan akses listrik.

Dengan adanya subsidi, pelanggan, terutama rumah tangga berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA, memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membayar tagihan listrik tepat waktu. Karena pembayaran lebih terjangkau, pelanggan tidak mengalami pemutusan sementara atau gangguan layanan akibat tunggakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap menggunakan listrik secara

kontinu untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti penerangan, memasak, dan penggunaan peralatan rumah tangga lainnya.

Kondisi ini penting bagi PLN karena konsumsi listrik tetap stabil. Stabilitas konsumsi memudahkan PLN dalam perencanaan distribusi energi, pengaturan beban jaringan, dan pemeliharaan sistem. Dengan konsumsi yang lebih terprediksi, risiko gangguan teknis seperti overload transformator atau penurunan tegangan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, subsidi listrik tidak hanya membantu pelanggan mempertahankan akses energi, tetapi juga mendukung keandalan dan efisiensi operasional sistem kelistrikan secara keseluruhan.

Namun terdapat dampak negatif:

- a. Keterlambatan pembayaran kompensasi subsidi dari pemerintah dapat mengganggu arus kas PLN.

Subsidi listrik diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban pembayaran pelanggan berdaya rendah, sementara PLN tetap menyalurkan energi listrik dan menanggung sebagian biaya yang seharusnya dibayar pelanggan. PLN kemudian menunggu kompensasi atau penggantian biaya subsidi dari pemerintah. Jika proses pencairan atau pembayaran kompensasi tersebut terlambat, arus kas PLN dapat terganggu karena perusahaan harus menutup biaya operasional,

pembelian energi, dan pemeliharaan jaringan menggunakan dana internal yang terbatas.

- b. Biaya operasional tetap tinggi, sementara penerimaan dari pelanggan bersubsidi lebih rendah.

Meskipun subsidi listrik membuat tarif lebih terjangkau bagi pelanggan berdaya rendah, biaya operasional PLN untuk menyalurkan listrik, termasuk biaya pembelian energi, pemeliharaan jaringan, perawatan transformator, dan pengelolaan administrasi tetap sama atau bahkan meningkat seiring dengan pertumbuhan konsumsi. Sementara itu, penerimaan dari pelanggan bersubsidi menjadi lebih rendah karena tarif yang dibayarkan lebih kecil dibanding tarif normal.

Situasi ini menimbulkan tekanan finansial pada PLN, karena perusahaan harus menutupi selisih biaya operasional dengan dana internal atau menunggu kompensasi dari pemerintah. Tekanan tersebut dapat memengaruhi kemampuan PLN dalam melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan jaringan, atau pengembangan infrastruktur baru. Dengan kata lain, meskipun subsidi listrik memberikan manfaat sosial dan membantu pelanggan berpenghasilan rendah, PLN menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan keuangan dan keberlanjutan operasional karena biaya tetap tinggi sementara pendapatan dari pelanggan bersubsidi lebih rendah.³⁰

³⁰ Ika Wisudawaty, "Analisis Dampak Subsidi Listrik Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah" : 33–39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pertuturan atau tulisan dan tingkah laku sesuatu subjek yang boleh diperhatikan dengan sendirinya. Penelitian kualitatif merujuk kepada kajian tingkah laku, persepsi, motivasi dan fenomena lain melalui pengalaman objek kajian, dalam konteks tertentu, melalui penerangan perkataan dan bahasa, dan dengan menggunakan berbagai pendekatan semula jadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, yang kemudian dideskripsikan agar orang lain mudah memahaminya.³¹

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran yang akurat. Data yang dikumpulkan berupa teks, gambar dan bukan angka. Hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif dan juga, semua yang dikumpulkan bisa menjadi kunci dari yang telah diteliti. Peneliti mempelajari data deskriptif berupa bahasa tulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati secara langsung, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang sedang terjadi.

³¹ Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. M.Hum Yuliatri Novita, PT. digilib.uinkhas.ac.id Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Wilayah penelitian biasanya mencakup lokasi (organisasi, instansi, atau lembaga) serta unit analisis yang diteliti. Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini adalah di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan yang berlokasi di Jl. Rengganis No. 99, Patokan, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282.

PT PLN (Persero) ULP Kraksaan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan unit layanan yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan dalam pengelolaan distribusi listrik, termasuk dalam penerapan kebijakan subsidi listrik. Selain itu, lokasi ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji penerapan biaya subsidi listrik dalam mengurangi tunggakan pelanggan serta implementasinya dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan. Dengan demikian, PT PLN (Persero) ULP Kraksaan dianggap tepat sebagai objek penelitian karena mampu memberikan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek berupa informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu individu yang terlibat langsung dalam proses penyusunan³², implementasi, dan evaluasi anggaran di PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan. Informan tersebut meliputi Manager

³² Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. M.Hum Yuliatri Novita, PT.

Keuangan, Supervisor ULP, Staf Perencanaan dan Pengawasan, serta pihak lain yang relevan seperti auditor internal.

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, mencakup data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali pemahaman mendalam mengenai subsidi listrik. Data dokumen mencakup laporan tunggakan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung atas praktik penganggaran di lapangan.

Untuk menjamin kesahihan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan observasi, sehingga diperoleh data yang valid, kredibel, dan dapat dipercaya. Adapun informan yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manager ULP kraksaan Bapak Hans Tua M Sinaga
2. Supervisor dan bagian keuangan Ibu Fahriza Avianti
3. Team leader Bapak Abdur Rahman

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditentukan.³³

³³ Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. M.Hum Yuliatri Novita, PT.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, yaitu dengan berinteraksi secara langsung dengan informan atau subjek yang diteliti.³⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi alamiah di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang berkaitan dengan penerapan subsidi listrik di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan. Adapun data yang diperoleh melalui teknik observasi meliputi:

- a. Proses pelaksanaan kebijakan subsidi listrik kepada pelanggan.
- b. Data tunggakan pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan
- c. Kategori pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan
- d. Kondisi nyata kepatuhan pembayaran pelanggan sebelum dan sesudah penerapan subsidi listrik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan

³⁴ Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. M.Hum Yuliatr Novita, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

untuk memperoleh informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat fleksibel dan tidak menggunakan pedoman pertanyaan yang tersusun secara rinci, melainkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. Kelayakan ekonomi dari penerapan subsidi listrik dalam mengurangi tunggakan pelanggan.
- b. Proses perencanaan dan pertimbangan kebijakan subsidi listrik di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan.
- c. Implementasi subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan.
- d. Dampak penerapan subsidi listrik terhadap kondisi keuangan perusahaan, khususnya terkait tunggakan pelanggan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penerapan subsidi listrik dan tunggakan pelanggan. Adapun data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data tunggakan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan subsidi listrik.

- b. Laporan keuangan atau data administratif terkait subsidi listrik.

E. Analisis Data

Analisis data mencakup prosedur analisis data yang dilakukan sehingga menguraikan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, seperti proses yang dilakukan untuk melacak, mengatur, dan mengklasifikasikan data.³⁵

Analisis data disini berarti mengorganisasikan materi secara sistematis dari wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan pemikiran, perspektif, teori atau gagasan baru.³⁶ Ada beberapa langkah untuk menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, dan menyederhanakan data sehingga lebih teratur dan mudah ditarik kesimpulannya. Data lapangan yang biasanya sangat banyak dan kompleks perlu dicatat secara teliti serta segera dianalisis agar tidak semakin rumit seiring waktu penelitian. Melalui reduksi data, peneliti merangkum dan memfokuskan hanya pada informasi yang pokok dan relevan. Hasil reduksi ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan serta melanjutkan

³⁵ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2025th Ed. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025). 80-108..

³⁶ Ummu Zakiyyatul Miskiyyah And Ishmatun Nihayah, "Implementasi Metode Role Playing Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqih Kelas Ix Di Mts Thoriqul Ulum" *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024).

proses pengumpulan data berikutnya.³⁷

2. Penyajian Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara akurat berdasarkan data hasil wawancara dan observasi. Simpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat. Namun, apabila simpulan awal tersebut konsisten dengan temuan data yang valid pada tahap pengumpulan berikutnya, maka simpulan tersebut dinyatakan kredibel.³⁸

F. Keabsahan Data

Bagian ini berisi bagaimana peneliti berusaha untuk mendapatkan validitas data yang ditemukan di lapangan. Untuk mendapatkan temuan yang valid, perlu menggunakan teknik validitas data untuk memeriksa kredibilitasnya. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

³⁷ Ummu Zakiyyatul Miskiyyah And Ishmatun Nihayah, "Implementasi Metode Role Playing Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Fiqih Kelas Ix Di Mts Thoriqul Ulum" *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024)

³⁸ Margrettha Lovinda Sagala, "Analisis Pelaksanaan Cara Perhitungan Pungutan Bea Keluar Beberapa Perusahaan Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Dan Produk Turunannya (Olein Dan Pfd) (Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta)," 2022, 22–30.

Kegunaan triangulasi adalah untuk men-*tracking* ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu pemberi informasi dengan pemberi informasi lainnya.³⁹ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain. Dalam hal tersebut, setelah data didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber, langkah selanjutnya kemudian data tersebut harus didiskripsikan, lalu dikategorikan, serta dilihat tentang pandangan yang sama, yang berbeda, termasuk mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Sehingga, sebuah kesimpulan diperoleh dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset.⁴⁰

2. Triangulasi Teknik

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, periset dapat menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Triangulasi teknik,

³⁹ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, 2023.

⁴⁰ Andarusni Alfansyur And Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis* 5, No. 2 (2020): 146-50.

berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.⁴¹

G. Tahapan Penelitian

1. Penelitian Pendahuluan, dilakukan dengan studi awal terhadap literatur terkait penerapan subsidi listrik, serta pengamatan awal di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan untuk memahami konteks organisasi dan menetapkan fokus penelitian.
2. Pengembangan Desain Penelitian, meliputi penyusunan rumusan masalah, tujuan penelitian, pendekatan kualitatif studi kasus, identifikasi informan kunci, serta penyiapan instrumen seperti pedoman wawancara dan daftar dokumen yang akan ditelaah.
3. Pelaksanaan Penelitian Lapangan, dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan teknik wawancara mendalam, observasi⁴², serta dokumentasi di lingkungan PT PLN (Persero) ULP Kraksaan. Selama tahap ini, peneliti juga melakukan pencatatan dan pengorganisasian data.
4. Analisis Data, dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan teknik triangulasi.
5. Penyusunan Laporan Penelitian, mencakup penyusunan hasil temuan, pembahasan, simpulan, dan saran dalam bentuk laporan akhir atau skripsi, yang disusun secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah.

⁴² Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. M.Hum Yuliatr Novita, PT. Global Eksekutif Teknologi (Padang, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=ob3ejyaa>

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai penerapan biaya subsidi listrik dalam mengurangi tunggakan pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil PLN (Persero) ULP Kraksaan

PT PLN (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara yang mengelola kelistrikan di Indonesia mulai dari pembangkitan, penyaluran, sampai pendistribusian serta penjualan energi listrik. Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/ Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

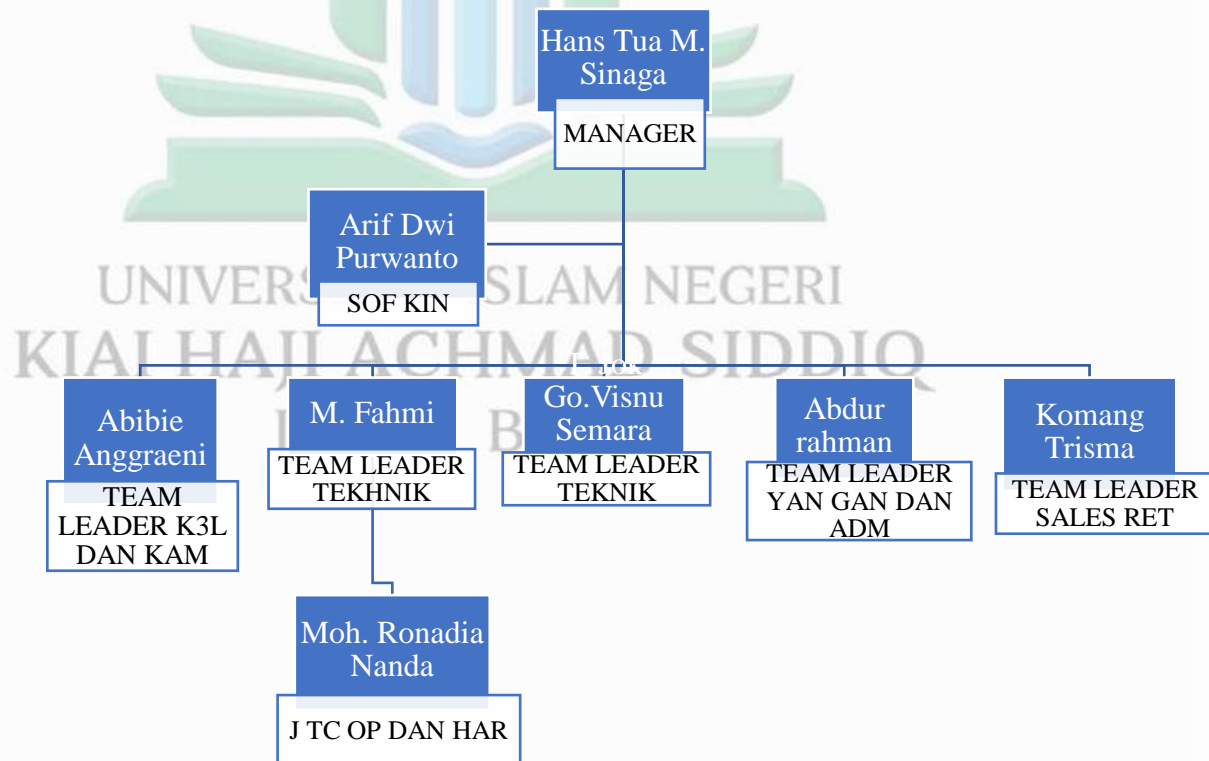
Salah satu unit distribusi yang menyumbang pendapatan terbesar di PT. PLN (Persero) adalah Unit Induk Distribusi Jawa Timur yang mengelola pendistribusian dan penjualan energi listrik di wilayah Jawa Timur. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur membawahi 16 UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) dan 1 UP2D (Unit Pelaksanaan Pengatur Distribusi) serta 114 ULP (Unit Layanan Pelanggan). UP3 Pasuruan merupakan salah satu UP3 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang menangani pelayanan listrik di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Dalam menjalankan operasional pendistribusian listrik UP3 Pasuruan dibagi menjadi 9 ULP yaitu ULP Pasuruan Kota, ULP Gondang Wetan, ULP Prigen, ULP Pandaan, ULP Sukerejo, ULP Bangil, ULP Grati, ULP Probolinggo dan ULP Kraksaan. Kantor PT PLN (Persero) ULP Kraksaan berlokasi di Jl. Rengganis No 99 Kraksaan, Kab. Probolinggo.

ULP Kraksaan melayani 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gading, Kecamatan Maron, Kecamatan Krucil, Kecamatan Krejengan, Kecamatan

Paiton, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kota Anyar, Kecamatan Krucil, Kecamatan Tiris, dan Kecamatan Besuk.

PT PLN (Persero) ULP Kraksaan disuplai dari 2 (dua) Gardu Induk, yaitu Gardu Induk Kraksaan dan Gardu Induk Paiton. Gardu Induk Kraksaan menyuplai penyulang diantaranya Penyulang Wangkal, Genggong, Besuk, Sidomukti, Jabung, Pajarakan, Krecengan, Klaseman. Sedangkan Gardu Induk Piton menyuplai tiga penyulang yaitu penyulang Ash disphosal, Pakuniran, Bhinor.⁴³

2. Struktur organisasi



Gambar 4.1: Bagan struktur organisasi PLN (Persero) ULP Kraksaan
Sumber: Data PLN (Persero) ULP Kraksaan

Bagan susunan organisasi PLN ULP Kraksaan menampilkan struktur kepemimpinan yang dipusatkan pada seorang Manager ULP yang berada pada posisi puncak. Manager ini memimpin seluruh unit dan bertanggung jawab atas koordinasi dan arah operasional di lingkungan ULP Kraksaan. Di bawah pimpinan Manager, terdapat beberapa Team Leader yang membawahi bidang-bidang strategis. Bidang tersebut meliputi:

1. K3L dan KAM, yang menangani aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
2. Teknik, yang bertanggung jawab atas operasional teknis kelistrikan.
3. TE (Teknik Energi / Teknik Operasional tertentu), yang memfokuskan pada kegiatan teknis lanjutan di lapangan.
4. Pelayanan Administrasi dan Pengaduan, yang mengelola layanan pelanggan, administrasi, dan penanganan gangguan.
5. Sales Retail, yang mengurus pemasaran, pelayanan pelanggan, dan aktivitas penjualan kelistrikan.

Pada struktur tersebut juga terdapat personel pendukung yang bekerja di bawah salah satu Team Leader, yaitu seorang staf yang menangani Jaringan, Operasi, dan Pemeliharaan, yang turut menguatkan aspek pengelolaan jaringan listrik di lapangan. Selain itu, terdapat pula jabatan Supervisor Keuangan dan Administrasi, yang mengelola kegiatan administrasi dan keuangan guna memastikan kelancaran proses operasional perusahaan. Secara keseluruhan, bagan ini memperlihatkan pembagian tugas yang jelas, dengan tiap posisi memiliki fungsi spesifik

untuk mendukung kelancaran operasional PLN ULP Kraksaan dan memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan.

3. Visi Misi dan Budaya Kerja PT PLN (Persero) ULP Kraksaan

a. Visi

Menjadi perusahaan listrik terkemuka se-asia tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi.

b. Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasa lingkungan.

c. Budaya Kerja PT PLN (Persero) ULP Kraksaan

Tata Nilai PLN adalah AKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan

ataupun menghadapi perubahan

6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergi⁴⁴

2. Kategori pelanggan

Tabel 4.1
Kategori pelanggan

No	Kategori tarif	Keterangan
1.	B1	Pemakaian listrik pelanggan bisnis kecil (< 6.600 VA)
2.	B2	Pemakaian listrik pelanggan bisnis menengah (6.600 VA – 200 kVA)
3.	S1	Pemakaian listrik sangat kecil (220 VA)
4.	R1	Pemakaian pelanggan rumah tangga (450 VA-2.200 VA)
5.	R1M	Pemakaian listrik yang mampu (900 VA)

Sumber: data tunggakan pelanggan PLN (Persero) ULP Kraksaan

Kategori tarif listrik merupakan pengelompokan pelanggan PLN berdasarkan fungsi penggunaan listrik serta besar daya yang terpasang. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan besaran tarif dasar listrik, kebijakan subsidi, beban biaya, serta prioritas pelayanan energi bagi masing-masing pengguna. Secara umum, tarif listrik dibedakan menjadi kategori

rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, dan kelompok khusus seperti konsumen sangat kecil atau rumah tangga mampu.

1. Kategori **B1** merupakan pelanggan listrik untuk sektor bisnis kecil dengan daya kurang dari 6.600 VA. Pelanggan pada kelompok ini biasanya terdiri dari usaha mikro dan kecil seperti toko kelontong, warung makan, kios, usaha laundry skala kecil, atau usaha rumahan lainnya. Tarif pada kategori ini umumnya disesuaikan agar tetap terjangkau sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil.
2. Kategori **B2** mencakup penggunaan listrik untuk pelanggan bisnis menengah dengan daya antara 6.600 VA hingga 200 kVA. Kelompok ini umumnya terdiri dari pelaku usaha menengah seperti restoran besar, hotel skala menengah, minimarket, hingga fasilitas layanan publik berbasis bisnis. Tarif listrik pada kategori ini tidak lagi bersubsidi dan menyesuaikan dengan kemampuan operasional usaha.
3. Kategori **I2** diperuntukkan bagi industri skala menengah dengan kebutuhan daya yang lebih tinggi dibanding kategori bisnis. Pengguna dalam kategori ini termasuk perusahaan manufaktur kelas menengah, pabrik pengolahan, atau aktivitas industri lainnya yang membutuhkan pasokan listrik stabil dalam jumlah besar. Tarif kategori ini umumnya lebih kompetitif karena sektor industri berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
4. Kategori **P1** merupakan kelompok pelanggan yang terdiri dari instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Tarif untuk kategori ini

ditetapkan berdasarkan struktur penggunaan anggaran negara dan daerah, karena sektor ini menjalankan fungsi pelayanan publik namun tidak termasuk penerima subsidi.

5. Kategori **S1** adalah kelompok pelanggan listrik dengan pemakaian sangat kecil, umumnya hanya 220 VA. Pelanggan dalam kategori ini biasanya merupakan rumah tangga kurang mampu yang masih menggunakan listrik dengan daya minimum untuk kebutuhan dasar seperti penerangan dan peralatan sederhana.
6. Kategori **R1** mencakup pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA. Pada kategori ini, sebagian pelanggan masih mendapatkan subsidi terutama pada daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga tidak mampu, karena kelompok ini dianggap paling rentan secara ekonomi.
7. Kategori **R2** adalah pelanggan rumah tangga dengan pemakaian listrik daya 3.500 VA hingga 5.500 VA. Tarif untuk kategori ini tidak lagi bersubsidi karena kelompok ini dianggap sudah berada pada tingkat ekonomi yang lebih stabil dibanding kategori di bawahnya.
8. Kategori **R3** diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA. Kelompok ini umumnya mencakup rumah tangga kelas menengah ke atas, perumahan mewah, apartemen premium, atau tempat tinggal dengan penggunaan listrik tinggi.
9. Terakhir, kategori **R1M** atau rumah tangga mampu dengan daya 900 VA merupakan pengguna rumah tangga yang secara daya tergolong rendah

tetapi secara ekonomi tidak lagi layak menerima subsidi. Kelompok ini ditetapkan melalui kebijakan reformasi subsidi listrik agar penyaluran dana pemerintah lebih tepat sasaran.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.

1. Kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik dalam upaya mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) ULP di wilayah Kraksaan

Penerapan subsidi listrik di wilayah Kraksaan terbukti memiliki dampak yang bermakna dalam mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan. Sebelum subsidi diberlakukan, banyak pelanggan, terutama rumah tangga dengan daya rendah seperti 450 VA dan 900 VA, mengalami kesulitan untuk membayar tagihan tepat waktu karena keterbatasan ekonomi. Hal ini menyebabkan tingginya angka tunggakan yang berdampak pada arus kas dan kelancaran operasional PLN.

Setelah subsidi diterapkan, beban biaya listrik bagi pelanggan berkurang, sehingga mereka mampu melunasi tagihan secara lebih cepat

dan konsisten. Penurunan tunggakan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan, tetapi juga membantu PLN dalam menjaga stabilitas arus kas dan perencanaan operasional. Dengan demikian, subsidi listrik memberikan manfaat ganda: meringankan beban finansial pelanggan berpenghasilan rendah sekaligus mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional PLN di wilayah Kraksaan.

Dari hasil wawancara dengan Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

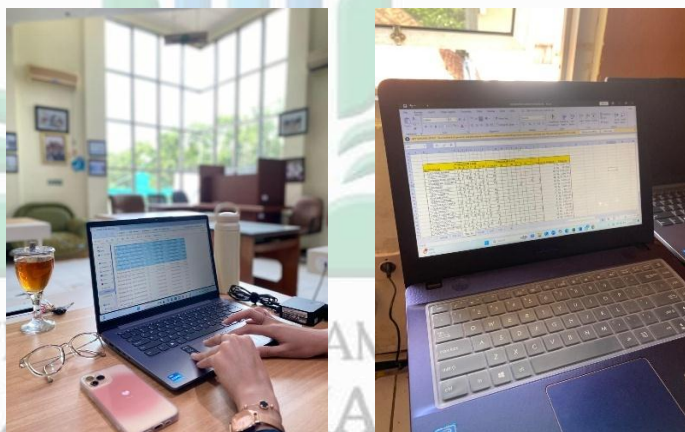
“Sebelum subsidi diterapkan penuh, tingkat tunggakan pelanggan terutama pada golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA masih cukup tinggi, terutama karena kondisi ekonomi masyarakat. Setelah subsidi berjalan, kami melihat adanya penurunan tunggakan yang cukup jelas. Pelanggan yang sebelumnya menunda pembayaran karena keterbatasan ekonomi kini mampu melunasi lebih cepat.”⁴⁵

Sebelum subsidi listrik diterapkan secara penuh, tingkat tunggakan pelanggan, khususnya pada golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, masih relatif tinggi. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi masyarakat yang membuat pembayaran tagihan listrik bukan menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan pokok lainnya. Situasi tersebut menyebabkan sebagian pelanggan memilih menunda pembayaran hingga memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun, setelah subsidi listrik diberlakukan, terjadi perubahan yang bermakna dalam pola pembayaran pelanggan. Dengan adanya pengurangan beban biaya listrik, pelanggan yang sebelumnya kesulitan kini mampu melunasi tagihan lebih cepat dan

tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi listrik memiliki dampak positif dalam meningkatkan kemampuan bayar masyarakat serta membantu menekan angka tunggakan pembayaran pada kelompok pelanggan berpendapatan rendah.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan bahwa:

“Berdasarkan data yang kami kelola, terdapat penurunan tunggakan yang cukup bermakna setelah subsidi diberlakukan. Sebelum subsidi, tunggakan terbesar memang berasal dari pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Rata-rata tunggakan pada kelompok pelanggan ini cukup tinggi karena sebagian besar berasal dari keluarga dengan penghasilan terbatas.”⁴⁶



Gambar 4.2

Data Tunggakan Pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan

Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti, diambil di PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan, 1 Desember 2025

Pernyataan supervisor bagian keuangan tersebut menggambarkan bahwa penerapan subsidi listrik memberikan dampak nyata terhadap penurunan tunggakan pembayaran pelanggan di wilayah ULP Kraksaan.

Berdasarkan data keuangan yang mereka kelola, subsidi berkontribusi

⁴⁶ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. digilib.uinkhas.ac.id

secara langsung pada meningkatnya kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik. Sebelum subsidi diberlakukan, kelompok pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA merupakan penyumbang terbesar tunggakan karena mayoritas berada pada kategori rumah tangga berpenghasilan rendah, sehingga pembayaran listrik sering tertunda atau dilakukan tidak tepat waktu. Setelah adanya subsidi, beban pembayaran menjadi lebih ringan sehingga pelanggan dalam kategori ini lebih mampu melunasi tagihan secara teratur. Dengan demikian, data tersebut menegaskan bahwa subsidi bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga instrumen kebijakan yang bermakna dalam menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan pembayaran, serta memperbaiki arus kas operasional PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan.

Setelah diberlakukannya subsidi listrik, terdapat pandangan PLN dari sisi ekonomi terkait program subsidi listrik ini, berikut pernyataan dari manager ULP, bahwa:

“Jika dilihat dari aspek ekonomi dan keberlanjutan operasional, program subsidi ini layak diterapkan. Meskipun subsidi dikeluarkan oleh pemerintah, efeknya secara langsung dirasakan PLN melalui peningkatan arus kas masuk. Pendapatan menjadi lebih teratur, sehingga PLN dapat melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan jaringan dengan lebih baik. Ini secara tidak langsung mengurangi risiko gangguan teknis, seperti overload transformator, akibat ketidakstabilan pola pembayaran pelanggan.”⁴⁷

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Dengan pendapatan yang lebih teratur, PLN dapat merencanakan kebutuhan operasional secara lebih bermakna,

⁴⁷ Manager ULP, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terutama terkait pemeliharaan jaringan, perawatan transformator, serta peningkatan kualitas layanan distribusi listrik. Hal ini sangat penting untuk mencegah gangguan teknis di lapangan yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan beban atau penundaan pemeliharaan. Jadi, dari sisi Billing & Revenue Control, subsidi ini tidak hanya membantu pelanggan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan operasional PLN⁴⁸

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penerapan subsidi listrik tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan pembayaran pelanggan, tetapi juga memberikan manfaat operasional bagi PLN. Dengan adanya subsidi, tingkat kepatuhan pembayaran meningkat sehingga pendapatan PLN menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi. Stabilitas pemasukan ini sangat penting untuk keberlanjutan operasional, karena memungkinkan PLN menyusun rencana keuangan dan anggaran dengan lebih akurat. Melalui pendapatan yang lebih teratur, PLN dapat mengalokasikan dana secara tepat waktu untuk kegiatan operasional seperti pemeliharaan jaringan listrik, perawatan transformator, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan mutu layanan distribusi. Pemeliharaan yang terencana dan tepat waktu ini dapat mencegah gangguan teknis yang sering terjadi akibat peralatan bekerja melebihi batas atau karena penundaan perawatan. Salah satu contoh risiko teknis yang dapat diminimalkan adalah overload transformator, yang dapat terjadi ketika beban listrik tidak seimbang atau peralatan melewati masa layannya tanpa pemeriksaan berkala.

⁴⁸ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. gilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data observasi terkait penerapan subsidi listrik di wilayah PT PLN (Persero) ULP Kraksaan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi listrik memiliki dampak yang bermakna dan positif baik dari sisi pelanggan maupun dari sisi operasional perusahaan. Subsidi listrik terbukti mampu menekan angka tunggakan pembayaran pelanggan, terutama pada golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang sebelumnya menjadi penyumbang tunggakan terbesar akibat keterbatasan kemampuan ekonomi. Setelah penerapan subsidi, kelompok pelanggan ini menunjukkan peningkatan kepatuhan dalam melakukan pembayaran tagihan listrik secara tepat waktu. Dari sudut pandang ekonomi dan operasional PLN, subsidi listrik dinilai layak dan memberikan manfaat nyata. Peningkatan kepatuhan pembayaran berdampak langsung pada arus kas PLN yang menjadi lebih stabil, terencana, dan dapat diprediksi.

Kondisi tersebut memungkinkan PLN untuk menjalankan pengelolaan keuangan dengan lebih optimal, termasuk dalam perencanaan anggaran pemeliharaan jaringan distribusi, perawatan transformator, dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, dengan adanya stabilitas pembayaran, risiko gangguan teknis seperti overload transformator dan penurunan kualitas jaringan dapat diminimalisir karena aktivitas operasional dan pemeliharaan dapat dilakukan sesuai jadwal tanpa penundaan. Secara keseluruhan, penerapan subsidi listrik di ULP Kraksaan tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi pelanggan

berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran, efisiensi operasional, dan keberlanjutan layanan PLN. Dengan demikian, subsidi listrik dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang bermakna dan layak untuk diterapkan dalam rangka mengurangi tunggakan pelanggan serta menjaga stabilitas operasional penyedia layanan energi listrik.

2. Implementasi kebijakan subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan

Tingkat keberhasilan kebijakan subsidi listrik dapat dilihat dari sejauh mana subsidi tersebut mampu meningkatkan kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan listrik tepat waktu serta menurunkan angka tunggakan pelanggan. Dalam konteks PT PLN (Persero) ULP Kraksaan, implementasi subsidi listrik menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap perubahan perilaku pembayaran pelanggan, khususnya pada kelompok rumah tangga berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA.

a. Subsidi listrik sebagai faktor pendorong kepatuhan pembayaran

1. Subsidi Listrik Meningkatkan Akses Energi dan Menumbuhkan Kepatuhan Pembayaran

Subsidi listrik meningkatkan akses energi bagi masyarakat kurang mampu, karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup mencakup

pendidikan, pelayanan kesehatan, serta produktivitas ekonomi. Setelah subsidi listrik diterapkan, kelompok pelanggan berdaya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, yang sebelumnya sering menunda atau membatasi penggunaan listrik karena keterbatasan biaya, kini menunjukkan perilaku pembayaran yang lebih disiplin. Banyak pelanggan yang sebelumnya menunggak tagihan listrik secara rutin kini mampu membayar tepat waktu, sehingga terjadi penurunan tunggakan yang bermakna

Selain dari sisi pembayaran, subsidi juga memungkinkan pelanggan tetap menggunakan listrik secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari, seperti penerangan rumah, memasak, belajar anak, dan penggunaan peralatan rumah tangga lainnya. Dengan kata lain, subsidi tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga meningkatkan akses energi secara berkelanjutan, yang berimbas pada kualitas hidup pelanggan.

Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

“Banyak pelanggan yang sebelumnya membatasi penggunaan listrik karena keterbatasan biaya kini dapat menggunakan listrik lebih optimal. Hal ini menunjukkan dampak positif subsidi terhadap akses energi dan kualitas hidup masyarakat.”⁴⁹

Sebelum subsidi diberlakukan, banyak pelanggan dengan daya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, terpaksa membatasi penggunaan listrik karena biaya tagihan yang relatif tinggi

⁴⁹ Manager ULP, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dibandingkan kemampuan finansial mereka. Pembatasan ini dapat berupa pengurangan waktu penggunaan lampu, peralatan elektronik, atau alat rumah tangga lainnya, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kualitas hidup sehari-hari. Setelah subsidi diterapkan, beban biaya listrik menjadi lebih ringan sehingga pelanggan dapat memanfaatkan listrik secara optimal. Mereka dapat menyalakan lampu lebih lama untuk belajar atau bekerja, menggunakan peralatan rumah tangga untuk keperluan sehari-hari, dan menjaga kualitas hidup tanpa khawatir tagihan listrik membengkak.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Dari data yang kami kelola, setelah subsidi listrik diterapkan, pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA mampu membayar tagihan lebih tepat waktu dan konsisten. Dengan pembayaran yang lebih teratur, mereka tidak lagi perlu membatasi penggunaan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi listrik memberikan dampak positif tidak hanya pada kemampuan bayar pelanggan, tetapi juga pada akses energi dan kualitas hidup masyarakat.”⁵⁰

Pernyataan Supervisor Bagian Keuangan menjelaskan bahwa penerapan subsidi listrik memberikan dampak nyata terhadap kemampuan bayar pelanggan sekaligus akses energi mereka. Sebelum subsidi diterapkan, banyak pelanggan dengan daya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, sering menunda pembayaran atau membatasi penggunaan listrik karena biaya

⁵⁰ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. gilib.uinkhas.ac.id

yang relatif tinggi dibandingkan kemampuan finansial mereka. Pembatasan ini berdampak pada kualitas hidup sehari-hari, misalnya mengurangi penerangan, membatasi penggunaan peralatan rumah tangga, serta memengaruhi produktivitas dan kenyamanan keluarga. Setelah subsidi diberlakukan, beban biaya listrik menjadi lebih ringan sehingga pelanggan mampu membayar tagihan secara tepat waktu dan konsisten. Dengan kemampuan bayar yang lebih baik, mereka tidak lagi perlu membatasi penggunaan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi listrik memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kemampuan finansial pelanggan sekaligus menjaga akses energi secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan mendukung stabilitas operasional PLN.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data observasi terkait, dapat disimpulkan bahwa penerapan subsidi listrik di wilayah Kraksaan memberikan dampak yang bermakna dan positif baik bagi pelanggan maupun bagi PLN. Subsidi listrik terbukti mampu menurunkan tunggakan pembayaran, khususnya pada pelanggan berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA, karena beban biaya listrik menjadi lebih ringan sehingga mereka mampu membayar tagihan tepat waktu dan konsisten. Selain itu, subsidi juga memungkinkan pelanggan menggunakan listrik

secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk penerangan, memasak, belajar, dan penggunaan peralatan rumah tangga lainnya, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari sisi operasional PLN, peningkatan kepatuhan pembayaran ini menstabilkan arus kas, mempermudah perencanaan pemeliharaan jaringan dan transformator, serta mendukung keberlanjutan layanan. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang bermakna untuk meningkatkan akses energi dan menjaga stabilitas operasional PLN.

2. Subsidi menurunkan beban biaya dan mengurangi dilema pembiayaan

Penerapan subsidi listrik membantu menurunkan beban biaya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah Kraksaan

Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

“Subsidi listrik membuat tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA menjadi lebih terjangkau. Dengan biaya yang lebih ringan, rumah tangga berpenghasilan rendah tidak perlu lagi menghadapi dilema antara membayar listrik atau memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan, pendidikan, atau kesehatan. Subsidi ini sangat membantu meringankan tekanan ekonomi keluarga dan memastikan mereka tetap bisa menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.”⁵¹

⁵¹ Manager ULP, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebelum subsidi diberlakukan, pelanggan rumah tangga dengan daya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, sering menghadapi dilema antara membayar tagihan listrik atau memenuhi kebutuhan pokok lain seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan. Biaya listrik yang relatif tinggi dibandingkan kemampuan finansial mereka membuat sebagian keluarga terpaksa menunda pembayaran atau membatasi penggunaan listrik, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup sehari-hari.

Dengan adanya subsidi, tarif listrik menjadi lebih terjangkau sehingga beban biaya listrik berkurang. Hal ini memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk membayar tagihan listrik tanpa harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya, pelanggan tetap dapat memanfaatkan listrik secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari seperti penerangan, memasak, dan belajar anak, sehingga kualitas hidup mereka tetap terjaga. Secara keseluruhan, subsidi listrik tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial, mengurangi tekanan ekonomi, dan memastikan akses energi tetap tersedia secara berkelanjutan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Dari data yang kami kelola, subsidi listrik menurunkan beban biaya bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA sehingga mereka mampu membayar tagihan tepat waktu tanpa harus menunda pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya. Sebelumnya, sebagian pelanggan menunda pembayaran atau membatasi pemakaian listrik karena biaya tinggi, yang sering menimbulkan dilema antara energi dan kebutuhan pokok. Dengan subsidi, dilema tersebut berkurang, dan mereka dapat memanfaatkan listrik secara optimal.”⁵²



Gambar 4.3 melihat arsip pelanggan di PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan

Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti, diambil di PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan, 1 Desember 2025

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa subsidi listrik secara langsung meringankan beban finansial pelanggan berdaya rendah, khususnya 450 VA dan 900 VA, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran listrik tepat waktu. Sebelumnya, banyak pelanggan menghadapi kesulitan karena tarif listrik relatif tinggi dibandingkan pendapatan mereka. Kondisi ini sering membuat rumah tangga menunda pembayaran

⁵² Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. digilib.uinkhas.ac.id

atau membatasi penggunaan listrik, yang menimbulkan dilema antara memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan pokok lainnya, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan adanya subsidi, biaya listrik menjadi lebih terjangkau, sehingga dilema tersebut berkurang. Pelanggan tidak perlu lagi mengorbankan kebutuhan dasar demi membayar listrik, dan mereka dapat menggunakan listrik secara optimal untuk kegiatan sehari-hari, seperti penerangan, memasak, belajar anak, dan penggunaan peralatan rumah tangga. Dengan demikian, subsidi listrik memberikan manfaat ganda: meningkatkan kemampuan bayar pelanggan sekaligus menjaga akses energi yang berkelanjutan, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data observasi terkait, dapat disimpulkan bahwa penerapan subsidi listrik di wilayah Kraksaan memberikan dampak positif yang bermakna bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Subsidi listrik menurunkan beban biaya listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA, sehingga mereka mampu membayar tagihan tepat waktu tanpa harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan biaya listrik yang lebih terjangkau, pelanggan dapat menggunakan listrik secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari,

yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup. Selain memberikan manfaat finansial bagi masyarakat, subsidi listrik juga mendukung stabilitas operasional PLN karena meningkatkan kepatuhan pembayaran dan menurunkan tunggakan. Dengan demikian, subsidi listrik berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang bermakna untuk meringankan tekanan ekonomi rumah tangga, menjaga akses energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Subsidi menjamin pemerataan akses energi dan menguatkan konsistensi pembayaran

Penerapan subsidi listrik berperan dalam menjamin distribusi akses energi yang merata di wilayah Kraksaan, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil

Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

“Subsidi listrik membuat tarif bagi pelanggan rumah tangga berdaya rendah lebih terjangkau, sehingga pelanggan di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil, tetap dapat mengakses energi listrik. Dengan subsidi, kita bisa memastikan bahwa seluruh warga, tanpa memandang lokasi atau kondisi ekonomi, memperoleh hak yang sama untuk menggunakan listrik. Ini sangat penting untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.”⁵³

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa subsidi listrik berperan dalam menjamin pemerataan akses energi bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tinggal di wilayah

⁵³ Manager ULP, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terpencil atau memiliki pendapatan rendah. Sebelum subsidi, biaya listrik yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi rumah tangga berdaya rendah untuk mengakses listrik secara penuh, terutama di daerah terpencil yang jarak distribusinya lebih jauh dan infrastruktur listriknya terbatas. Kondisi ini bisa menimbulkan ketimpangan, di mana sebagian warga mendapatkan layanan listrik lebih optimal dibandingkan yang lain.

Dengan adanya subsidi, tarif listrik bagi pelanggan berdaya rendah menjadi lebih terjangkau, sehingga pelanggan di semua wilayah dapat menggunakan listrik tanpa terbebani biaya tinggi. Subsidi listrik memastikan bahwa hak dasar masyarakat untuk mengakses energi terpenuhi secara merata, tanpa memandang lokasi geografis atau kondisi ekonomi. Dampak positifnya tidak hanya pada kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, karena listrik menjadi sarana penting untuk pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan produktivitas masyarakat di seluruh wilayah.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Berdasarkan data yang kami kelola, subsidi listrik menurunkan beban biaya bagi pelanggan berdaya rendah, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan pembayaran tagihan yang lebih terjangkau, pelanggan tetap dapat menikmati listrik secara berkelanjutan. Hal ini menjamin bahwa akses

energi tidak hanya terkonsentrasi di kota atau wilayah pusat, tetapi merata ke seluruh pelanggan, sehingga prinsip keadilan energi bagi semua warga negara dapat terpenuhi.”⁵⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa subsidi listrik memiliki peran strategis dalam menjamin pemerataan akses energi bagi seluruh pelanggan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Berdasarkan data yang dikelola oleh Supervisor Bagian Keuangan, subsidi listrik secara langsung menurunkan beban biaya bagi rumah tangga berdaya rendah, sehingga mereka mampu membayar tagihan listrik tepat waktu dan terus menikmati pasokan listrik secara berkelanjutan. Dengan tarif yang lebih terjangkau, pelanggan di wilayah terpencil tidak lagi menghadapi kendala finansial yang bisa membatasi penggunaan listrik. Hal ini memastikan bahwa akses energi tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah yang lebih maju, tetapi tersebar merata ke seluruh pelanggan, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Dampak sosialnya bermakna karena prinsip keadilan energi terpenuhi: seluruh warga negara, tanpa memandang lokasi atau kondisi ekonomi, mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan listrik.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data observasi terkait, bahwa subsidi listrik berperan penting dalam menjamin pemerataan akses energi bagi seluruh pelanggan, termasuk

⁵⁴ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. gilib.uinkhas.ac.id

rumah tangga berdaya rendah dan masyarakat di daerah terpencil. Subsidi ini menurunkan beban biaya listrik, sehingga pelanggan mampu membayar tagihan tepat waktu dan tetap dapat menikmati pasokan listrik secara berkelanjutan. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya meningkatkan keterjangkauan energi, tetapi juga memastikan prinsip keadilan energi terpenuhi, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta membantu PLN menjaga stabilitas operasional dan kualitas layanan di seluruh wilayah.

b. Dampak kebijakan subsidi listrik terhadap stabilitas pembayaran pelanggan

1. Mengurangi risiko tunggakan dan meningkatkan konsistensi pembayaran

Penerapan subsidi listrik berpengaruh terhadap risiko tunggakan pelanggan di wilayah Kraksaan, terutama untuk rumah tangga berdaya rendah

Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

“Subsidi listrik membuat tarif bagi pelanggan berdaya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, menjadi lebih terjangkau. Dengan biaya yang lebih ringan, pelanggan mampu membayar tagihan listrik tepat waktu dan konsisten. Sebelum subsidi, banyak pelanggan menunda pembayaran karena keterbatasan ekonomi, sehingga risiko tunggakan cukup tinggi. Setelah subsidi diterapkan, kami melihat penurunan yang bermakna pada tunggakan, yang secara langsung berdampak positif pada arus kas dan keberlanjutan layanan PLN.”⁵⁵

⁵⁵ Manager ULP Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Subsidi listrik membantu menurunkan risiko tunggakan pelanggan, khususnya rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA, dengan membuat tarif listrik lebih terjangkau. Sebelum subsidi, banyak pelanggan menunda pembayaran karena kendala finansial, yang menyebabkan tingginya tunggakan dan ketidakstabilan arus kas PLN. Setelah subsidi diberikan, beban biaya listrik berkurang sehingga pelanggan lebih mampu membayar tepat waktu. Hal ini menurunkan jumlah tunggakan secara bermakna, meningkatkan stabilitas arus kas, serta mendukung keberlanjutan operasional PLN. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya meringankan beban pelanggan, tetapi juga memperkuat efisiensi dan stabilitas keuangan PLN.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Dari data billing yang kami kelola, setelah subsidi diterapkan, pelanggan 450 VA dan 900 VA mampu membayar tagihan secara tepat waktu. Dengan tarif lebih terjangkau, mereka tidak lagi menunda pembayaran karena keterbatasan biaya. Hal ini secara langsung menurunkan risiko tunggakan dan menstabilkan arus kas PLN. Subsidi listrik terbukti bermakna menjaga kepatuhan pembayaran pelanggan dan mendukung kelancaran operasional perusahaan.”⁵⁶

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa **subsidi listrik** berperan penting dalam menurunkan risiko tunggakan dan menjaga stabilitas keuangan PLN. Berdasarkan data billing yang dikelola oleh Supervisor Bagian Keuangan, setelah subsidi diterapkan,

⁵⁶ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. gilib.uinkhas.ac.id

pelanggan berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA mampu membayar tagihan tepat waktu. Tarif listrik yang lebih terjangkau membuat mereka tidak perlu menunda pembayaran karena keterbatasan biaya. Subsidi listrik mampu menurunkan risiko tunggakan pelanggan secara bermakna, sehingga arus kas PLN menjadi lebih stabil. Kenaikan kepatuhan pembayaran memungkinkan PLN merencanakan operasional serta pemeliharaan jaringan dengan lebih bermakna, sehingga kontinuitas layanan listrik dapat terjaga. Dengan demikian, subsidi tidak hanya meringankan beban pelanggan, tetapi juga memperkuat stabilitas finansial dan keberlanjutan operasional PLN sebagai bagian dari manajemen risiko pembayaran.

Penerapan subsidi listrik di wilayah Kraksaan terbukti bermakna mengurangi risiko tunggakan pelanggan, terutama rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA. Subsidi membuat tarif lebih terjangkau sehingga pelanggan dapat membayar tagihan tepat waktu, mengurangi keterlambatan yang sebelumnya disebabkan kendala ekonomi. Hal ini meningkatkan stabilitas arus kas PLN dan mendukung keberlanjutan operasional, termasuk pemeliharaan jaringan dan kelancaran layanan listrik. Dengan demikian, subsidi tidak hanya meringankan beban finansial pelanggan, tetapi juga memperkuat efisiensi serta stabilitas keuangan PLN sebagai instrumen manajemen risiko pembayaran. Berikut merupakan tabel

tunggakan pelanggan sebelum subsidi dan sesudah subsidi tahun 2025

Tabel 4.2
Tunggakan pelanggan

No	Bulan	Kategori	Jumlah pelanggan	Total pelanggan yang menunggak	Keterangan
1.	Januari	B1	357	16.871	Sebelum diterapkan kebijakan subsidi
		B2	36		
		S1	666		
		I2	8		
		P1	5		
		R1	14.180		
		R2	12		
		R3	4		
		R1M	1703		
2.	Februari	B1	155	6.730	Setelah diterapkan kebijakan subsidi
		B2	4		
		S1	272		
		I2	1		
		P1	8		
		R1	5.536		
		R2	2		
R1M	752				

Sumber: data tunggakan pelanggan PLN (Persero) ULP
Kraksaan

Data tersebut menunjukkan perubahan yang cukup bermakna terhadap jumlah pelanggan yang menunggak sebelum dan sesudah penerapan kebijakan subsidi listrik di wilayah Kraksaan. Pada bulan Januari, yaitu sebelum subsidi diterapkan,

total pelanggan yang menunggak mencapai 16.871 dari berbagai kategori tarif, dengan kelompok pelanggan rumah tangga seperti R1 dan R1M menjadi penyumbang tunggakan terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum subsidi diberlakukan, beban biaya listrik relatif tinggi bagi pelanggan berdaya rendah sehingga banyak pelanggan menunda pembayaran atau mengalami kesulitan dalam melunasi tagihan listrik tepat waktu.

Namun, setelah kebijakan subsidi diterapkan pada bulan Februari, terjadi penurunan yang bermakna dalam jumlah pelanggan yang menunggak, yaitu dari 16.871 pelanggan pada Januari menjadi hanya 6.730 pelanggan pada Februari. Penurunan yang sangat mencolok terjadi pada kategori pelanggan rumah tangga seperti R1, R1M, dan S1, yang sebelumnya mendominasi tunggakan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi listrik berhasil meringankan beban biaya bagi pelanggan berpendapatan rendah, sehingga mereka mampu membayar tagihan listrik secara lebih tepat waktu dan konsisten. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa penerapan subsidi listrik memberikan dampak positif terhadap penurunan tunggakan pembayaran pelanggan. Selain membantu meningkatkan kemampuan pembayaran pelanggan, kebijakan ini juga sekaligus memperbaiki kondisi arus kas PLN, meningkatkan stabilitas finansial, serta mendukung keberlanjutan pelayanan listrik di wilayah Kraksaan.

2. Menjaga stabilitas konsumsi dan kelancaran arus kas

Subsidi listrik juga menciptakan rasa aman bagi pelanggan dalam menggunakan energi listrik, karena mereka tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran kenaikan tagihan atau ketidakmampuan membayar. Kondisi ini mendorong masyarakat Kraksaan untuk menggunakan listrik secara normal sesuai kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak terjadi pengurangan konsumsi secara drastis akibat faktor ekonomi. Dengan konsumsi yang lebih stabil dan terprediksi, PLN ULP Kraksaan dapat menjaga kualitas pelayanan, merencanakan kapasitas jaringan dengan lebih akurat, serta meminimalkan gangguan pasokan. Secara keseluruhan, subsidi listrik berkontribusi langsung terhadap terciptanya pola konsumsi listrik yang konsisten dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

“Dengan subsidi listrik, pelanggan rumah tangga berdaya rendah, seperti 450 VA dan 900 VA, tetap mampu membayar tagihan listrik tepat waktu. Hal ini membuat mereka tidak perlu lagi membatasi penggunaan listrik di rumah, sehingga konsumsi listrik tetap stabil. Sebelum subsidi, banyak pelanggan yang menunda atau mengurangi penggunaan listrik karena biaya tinggi, sehingga pola konsumsi menjadi tidak menentu. Subsidi membantu menjaga konsistensi penggunaan listrik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa subsidi listrik berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi listrik, terutama bagi rumah tangga berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA. Dengan adanya subsidi, pelanggan mampu membayar tagihan tepat waktu tanpa harus menunda atau membatasi penggunaan listrik di rumah. Sebelum subsidi diterapkan, biaya listrik yang relatif tinggi membuat banyak pelanggan mengurangi pemakaian atau menunda pembayaran, sehingga pola konsumsi listrik menjadi tidak menentu. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakstabilan distribusi listrik dan mempersulit PLN dalam mengelola jaringan serta beban listrik.

Dengan subsidi, pelanggan dapat menggunakan listrik secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari, seperti penerangan, memasak, dan peralatan rumah tangga lainnya. Hal ini menjaga konsistensi konsumsi listrik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, sehingga PLN dapat merencanakan distribusi listrik dengan lebih baik dan menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, subsidi listrik tidak hanya meringankan beban pelanggan, tetapi juga mendukung stabilitas operasional dan keberlanjutan pasokan listrik.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Data billing menunjukkan bahwa setelah subsidi diterapkan, pelanggan berdaya rendah mampu membayar tagihan tepat waktu dan tidak lagi menunda penggunaan listrik. Hal ini membuat pola konsumsi listrik tetap stabil

dari bulan ke bulan. Dengan konsumsi yang konsisten, arus kas PLN lebih terprediksi dan perencanaan operasional, seperti pemeliharaan jaringan dan pengelolaan beban, dapat dilakukan lebih bermakna.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa subsidi listrik memberikan dampak positif terhadap stabilitas konsumsi dan arus kas PLN. Berdasarkan data billing, setelah subsidi diterapkan, pelanggan berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA mampu membayar tagihan tepat waktu. Dengan tarif lebih terjangkau, mereka tidak perlu menunda penggunaan listrik, sehingga pola konsumsi menjadi konsisten dari bulan ke bulan.

Konsistensi ini memiliki dua dampak utama. Pertama, arus kas PLN menjadi lebih terprediksi, karena pembayaran pelanggan lebih teratur dan risiko tunggakan berkurang. Kedua, perencanaan operasional PLN menjadi lebih bermakna, termasuk pemeliharaan jaringan, pengelolaan beban, dan pengaturan distribusi listrik. Dengan konsumsi yang stabil, PLN dapat mencegah gangguan teknis, seperti overload transformator, serta memastikan layanan listrik tetap lancar dan berkualitas. Dengan kata lain, subsidi listrik tidak hanya membantu pelanggan dalam membayar tagihan, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional dan efisiensi manajemen energi PLN.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data observasi terkait, dapat disimpulkan bahwa subsidi listrik berperan bermakna

⁵⁸ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. gilib.uinkhas.ac.id

dalam menjaga stabilitas konsumsi listrik di wilayah Kraksaan, khususnya bagi rumah tangga berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA. Dengan tarif listrik yang lebih terjangkau, pelanggan mampu membayar tagihan tepat waktu tanpa menunda atau membatasi penggunaan listrik, sehingga pola konsumsi menjadi konsisten dari bulan ke bulan. Konsistensi ini membantu PLN dalam merencanakan distribusi listrik, mengelola beban jaringan, dan melakukan pemeliharaan secara lebih bermakna. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya meringankan beban finansial pelanggan, tetapi juga meningkatkan stabilitas arus kas, mendukung keberlanjutan operasional PLN, dan menjaga kualitas layanan listrik secara berkelanjutan.

c. Tantangan dalam implementasi subsidi

1. Keterlambatan pembayaran kompensasi subsidi dari pemerintah

Dampak keterlambatan pembayaran kompensasi subsidi dari pemerintah terhadap arus kas PLN karena perusahaan harus menanggung terlebih dahulu selisih biaya pokok penyediaan listrik dengan tarif yang dibayarkan pelanggan bersubsidi.

Manager ULP Menjelaskan, bahwa:

“Kompensasi subsidi dari pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi PLN, khususnya untuk pelanggan berdaya rendah. Jika pembayaran kompensasi terlambat, arus kas perusahaan bisa terganggu karena sebagian besar pendapatan dari pelanggan bersubsidi lebih rendah dibanding pelanggan non-subsidi. Keterlambatan ini mempersulit perencanaan operasional dan pemeliharaan

jaringan listrik, karena dana yang seharusnya tersedia untuk kebutuhan rutin menjadi terbatas.”⁵⁹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kompensasi subsidi dari pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus kas PLN, terutama untuk pelanggan berdaya rendah. Pelanggan berdaya rendah membayar tarif listrik yang lebih murah karena mendapatkan subsidi, sehingga pendapatan yang diterima PLN dari pelanggan ini relatif lebih rendah dibanding pelanggan non-subsidi. Untuk menutupi selisih biaya tersebut, pemerintah memberikan kompensasi subsidi.

Jika pembayaran kompensasi ini terlambat, arus kas PLN dapat terganggu karena perusahaan tidak menerima dana yang seharusnya menutupi kekurangan pendapatan dari pelanggan bersubsidi. Gangguan arus kas ini membuat PLN kesulitan merencanakan dan menjalankan operasional sehari-hari, termasuk pemeliharaan jaringan listrik dan perbaikan transformator. Dengan kata lain, keterlambatan kompensasi menghambat kemampuan PLN dalam menjaga kualitas layanan listrik dan keberlanjutan operasional secara bermakna.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Kompensasi subsidi dari pemerintah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi PLN, khususnya untuk pelanggan berdaya rendah. Jika pembayaran kompensasi terlambat, arus kas perusahaan bisa terganggu karena sebagian besar pendapatan dari pelanggan bersubsidi lebih

⁵⁹ Manager ULP, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. has.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rendah dibanding pelanggan non-subsidi. Keterlambatan ini mempersulit perencanaan operasional dan pemeliharaan jaringan listrik, karena dana yang seharusnya tersedia untuk kebutuhan rutin menjadi terbatas.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kompensasi subsidi dari pemerintah sangat penting bagi kelancaran keuangan PLN, terutama untuk pelanggan berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA. Pelanggan ini membayar tarif listrik yang lebih murah karena mendapat subsidi, sehingga pendapatan PLN dari kelompok ini lebih rendah dibandingkan pelanggan non-subsidi. Untuk menutup selisih tersebut, pemerintah memberikan kompensasi subsidi.

Jika pembayaran kompensasi dari pemerintah mengalami keterlambatan, arus kas PLN menjadi terganggu karena perusahaan tidak menerima dana yang seharusnya menutupi kekurangan pendapatan dari pelanggan bersubsidi. Gangguan arus kas ini berdampak pada perencanaan operasional dan pemeliharaan jaringan listrik, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan rutin seperti pemeliharaan transformator, perbaikan jaringan, atau pengelolaan beban, menjadi terbatas. Dengan kata lain, keterlambatan kompensasi dapat mempengaruhi kemampuan PLN menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan operasional secara optimal.

⁶⁰ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. gilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data observasi terkait, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran kompensasi subsidi dari pemerintah berdampak bermakna terhadap arus kas PLN, khususnya untuk pelanggan berdaya rendah seperti 450 VA dan 900 VA. Subsidi dari pemerintah merupakan komponen penting untuk menutupi selisih tarif listrik yang lebih rendah, sehingga jika kompensasi terlambat, PLN menghadapi gangguan arus kas yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan operasional harian, termasuk pemeliharaan jaringan dan transformator. Dengan demikian, keterlambatan kompensasi dapat menurunkan tingkat keberhasilan manajemen keuangan PLN, mempengaruhi keberlanjutan operasional, dan berpotensi menurunkan kualitas layanan listrik bagi pelanggan.

2. Biaya operasional tetap tinggi, sementara pendapatan pelanggan bersubsidi rendah

Biaya operasional merupakan suatu biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan diluar biaya produksi.⁶¹ Pengaruh biaya operasional terhadap penerimaan dari pelanggan bersubsidi

Manager ULP Menjelaskan, bahwa

“Walaupun tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi lebih rendah, biaya operasional PLN, seperti pemeliharaan jaringan, perawatan transformator, dan distribusi listrik, tetap tinggi. Hal ini membuat margin penerimaan dari pelanggan bersubsidi lebih rendah dibandingkan pelanggan non-subsidi. Oleh karena itu, meskipun subsidi

⁶¹ *AKUNTANSI MANAJEMEN: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen* (Grasindo, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=_4nn7njUp3wC.

membantu pelanggan, dari sisi operasional PLN, perusahaan tetap harus mengelola biaya yang tinggi agar kualitas layanan tetap terjaga.”⁶²

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah, biaya operasional PLN tidak berkurang. Biaya operasional ini mencakup pemeliharaan jaringan, perawatan transformator, distribusi listrik, dan kegiatan rutin lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas layanan.

Akibatnya, pendapatan yang diperoleh dari pelanggan bersubsidi relatif lebih rendah dibanding pelanggan non-subsidi, sehingga margin keuntungan atau kemampuan menutupi biaya operasional dari kelompok pelanggan ini menjadi terbatas. Meskipun subsidi membantu meringankan beban pelanggan, PLN tetap menghadapi tantangan dari sisi pengelolaan biaya tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan manajemen keuangan yang cermat agar operasional tetap lancar, pemeliharaan jaringan dilakukan tepat waktu, dan kualitas layanan listrik tidak terganggu. Dengan kata lain, subsidi memberikan manfaat sosial, tetapi dari perspektif operasional PLN, perusahaan tetap perlu strategi untuk menjaga keberlanjutan layanan.

Supervisor Bagian Keuangan menambahkan:

“Dari data billing yang kami kelola, pendapatan dari pelanggan bersubsidi memang lebih rendah karena tarif

yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, biaya operasional untuk menjaga jaringan tetap berjalan dan melakukan pemeliharaan rutin tidak berkurang. Hal ini menuntut PLN untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih cermat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Subsidi membantu, tapi tidak sepenuhnya menutup perbedaan antara biaya operasional dan penerimaan dari pelanggan bersubsidi.”⁶³

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa meskipun pelanggan bersubsidi membayar tarif listrik lebih rendah sesuai kebijakan pemerintah, biaya operasional PLN tetap tinggi. Biaya operasional ini mencakup pemeliharaan jaringan, perawatan transformator, distribusi listrik, dan kegiatan rutin lainnya yang tidak berkurang meskipun tarif listrik lebih murah. Akibatnya, penerimaan dari pelanggan bersubsidi tidak sepenuhnya menutupi pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan listrik.

Situasi ini menuntut PLN untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih cermat, agar arus kas tetap terjaga dan operasional perusahaan tidak terganggu. Subsidi pemerintah membantu menutupi sebagian perbedaan antara biaya operasional dan penerimaan dari pelanggan bersubsidi, tetapi tidak sepenuhnya menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain, subsidi menjadi instrumen penting untuk mendukung kelancaran

⁶³ Supervisor Bagian Keuangan, Diwawancara oleh Penulis, Kraksaan, 1 Desember 2025. digilib.uinkhas.ac.id

operasional, namun PLN tetap harus mengelola biaya dengan hati-hati agar layanan listrik tetap optimal dan berkelanjutan.

Penerapan subsidi listrik memang memberikan manfaat sosial dan finansial bagi pelanggan berdaya rendah dengan menurunkan tarif listrik sehingga mampu membayar tepat waktu. Namun, dari sisi operasional PLN, biaya untuk menjaga kualitas layanan tetap tinggi, termasuk pemeliharaan jaringan, perawatan transformator, dan distribusi listrik. Hal ini membuat pendapatan dari pelanggan bersubsidi lebih rendah dibanding pelanggan non-subsidi dan tidak sepenuhnya menutupi biaya operasional. Subsidi dari pemerintah membantu mengurangi kesenjangan ini, tetapi PLN tetap perlu melakukan perencanaan keuangan yang cermat agar arus kas tetap stabil dan operasional perusahaan berjalan lancar. Dengan demikian, subsidi listrik berperan penting dalam mendukung keberlanjutan layanan, namun manajemen biaya yang hati-hati tetap menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan listrik.

C. Pembahasan Temuan

1. Kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik dalam upaya mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) ULP di wilayah Kraksaan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan subsidi listrik di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan terbukti mampu menurunkan jumlah tunggakan

pelanggan secara signifikan, dari 16.871 pelanggan pada bulan Januari menjadi 6.730 pelanggan pada bulan Februari. Penurunan ini menunjukkan bahwa secara empiris subsidi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kemampuan bayar pelanggan, khususnya pada kelompok rumah tangga berdaya rendah.

Temuan ini sejalan dengan teori kelayakan ekonomi, yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dinilai layak apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks ini, subsidi listrik memberikan manfaat berupa penurunan piutang, peningkatan arus kas, serta stabilitas pendapatan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara finansial kebijakan subsidi mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurma Oktavia Sari dan Ariusni (2024) yang menyatakan bahwa subsidi listrik berpengaruh positif terhadap kemampuan konsumsi rumah tangga. Ketika beban pengeluaran listrik berkurang, masyarakat memiliki ruang finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk tagihan listrik. Dengan demikian, subsidi tidak hanya berdampak pada konsumsi, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pembayaran.

Selain itu, temuan ini relevan dengan penelitian Aiedil Pebri Suwarna dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa tunggakan listrik banyak terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah akibat keterbatasan

ekonomi. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa pelanggan cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding membayar listrik. Oleh karena itu, keberadaan subsidi menjadi solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi sehingga pelanggan tetap mampu memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa tingginya biaya operasional dan keterlambatan kompensasi subsidi dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Ningsih dan Syalikha (2024) yang menyatakan bahwa subsidi listrik dapat menimbulkan beban fiskal serta permasalahan dalam implementasi apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, meskipun subsidi terbukti layak secara ekonomi, diperlukan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan risiko keuangan baru bagi perusahaan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis biaya dan manfaat serta dukungan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan subsidi listrik di PLN ULP Kraksaan layak secara ekonomi karena mampu menekan tunggakan dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, meskipun masih memerlukan optimalisasi dalam implementasinya.

2. Implementasi kebijakan subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi listrik tidak hanya berdampak pada penurunan tunggakan, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan yang membayar tagihan tepat waktu setelah adanya kebijakan subsidi.

Temuan ini sejalan dengan teori perilaku konsumen dalam ekonomi, yang menyatakan bahwa kemampuan finansial sangat memengaruhi keputusan pembayaran. Ketika beban biaya listrik berkurang melalui subsidi, pelanggan cenderung lebih mampu dan lebih disiplin dalam melakukan pembayaran.

Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Rahmawati dan Firmansyah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan beban pengeluaran sangat memengaruhi kepatuhan pembayaran listrik. Dengan adanya subsidi, beban pengeluaran pelanggan menjadi lebih ringan sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk membayar tepat waktu.

Selain itu, penelitian Kadek Arika Putri (2022) menunjukkan bahwa upaya pengendalian tunggakan melalui pendekatan teknis seperti penagihan dan pemutusan listrik memang berjalan dengan baik, namun memiliki keterbatasan di lapangan. Dalam hal ini, subsidi listrik menjadi pendekatan yang lebih preventif karena mengatasi akar masalah, yaitu keterbatasan kemampuan bayar pelanggan, bukan hanya menindak akibatnya.

Selanjutnya, temuan ini juga berkaitan dengan penelitian Raditya Hari Nugraha dkk. (2022) yang mengungkap bahwa pelanggan kategori subsidi memiliki pola perilaku pembayaran yang berbeda dan cenderung lebih sensitif terhadap kebijakan tarif. Dengan adanya subsidi, perilaku pembayaran menjadi lebih stabil karena pelanggan merasa beban biaya lebih terjangkau.

Namun demikian, terdapat potensi moral hazard sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Buana Vidi dan Amrita Nugraheni Saraswaty (2025), di mana sebagian pelanggan dapat menjadi kurang efisien dalam penggunaan listrik karena adanya subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan subsidi perlu diimbangi dengan edukasi penggunaan energi agar tidak menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi subsidi listrik di PLN ULP Kraksaan berjalan dengan baik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan, karena mampu meningkatkan kemampuan bayar dan mendorong kedisiplinan pembayaran. Namun, keterlaksanaan tersebut perlu didukung dengan pengawasan, edukasi, serta ketepatan sasaran agar manfaatnya dapat berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT PLN (Persero) ULP Kraksaan*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Subsidi listrik bermakna mengurangi jumlah tunggakan pelanggan

Penerapan subsidi listrik terbukti mampu menurunkan jumlah pelanggan yang menunggak secara meneluruh. Berdasarkan data billing Januari hingga Februari 2025, terjadi penurunan tunggakan dari 16.871 pelanggan menjadi 6.730 pelanggan setelah subsidi diberlakukan. Penurunan ini terutama terjadi pada pelanggan rumah tangga berdaya rendah (450 VA dan 900 VA), yang sebelumnya merupakan kelompok penyumbang tunggakan terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi listrik bermakna dalam membantu pelanggan yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap mampu membayar tagihan secara tepat waktu.

2. Kebijakan subsidi listrik meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan subsidi listrik terlihat dari meningkatnya kedisiplinan pembayaran pelanggan. Pelanggan yang sebelumnya sering menunda pembayaran kini mampu konsisten melakukan pembayaran tepat waktu. Subsidi listrik juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan akses energi, stabilitas konsumsi listrik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi tidak hanya membantu meringankan beban biaya listrik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan perilaku kepatuhan pelanggan. Secara operasional, PLN juga memperoleh manfaat berupa stabilitas arus kas dan kemudahan dalam perencanaan jaringan.

Namun demikian, penerapan subsidi masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keterlambatan pembayaran kompensasi dari pemerintah dan tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan penerimaan dari pelanggan bersubsidi. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif internal PLN, implementasi subsidi masih membutuhkan pengelolaan dan perencanaan keuangan yang lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk PLN (Persero) ULP Kraksaan

PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan perlu memperkuat strategi internal dalam menjaga tingkat keberhasilan penerapan subsidi listrik, khususnya dalam mendorong kepatuhan pembayaran pelanggan. Upaya peningkatan sistem pengawasan dan monitoring pembayaran diperlukan agar tren penurunan tunggakan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Selain itu, edukasi pelanggan mengenai pentingnya pembayaran tepat waktu menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab penggunaan subsidi secara tepat sasaran. Optimalisasi

layanan digital seperti PLN Mobile juga merupakan strategi yang relevan untuk mempermudah proses transaksi, meningkatkan kenyamanan pelanggan, serta menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Dengan menerapkan ketiga rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan manfaat subsidi listrik dapat semakin optimal baik bagi pelanggan maupun keberlanjutan operasional PLN.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Secara keseluruhan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Penambahan variabel evaluasi kebijakan subsidi melalui *cost-benefit analysis* jangka panjang akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat keberhasilan subsidi tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari keberlanjutan finansial dan operasional PLN. Selain itu, perluasan wilayah penelitian ke ULP lain dapat memberikan pembandingan yang relevan sehingga tingkat keberhasilan kebijakan dapat dianalisis berdasarkan karakteristik regional yang berbeda. Dengan langkah tersebut, penelitian ke depan akan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih kuat serta rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, Muhammad. “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Medan Kota.” 6 (2022): 9067–9076.

Afif, Ahmad, dan Lailiyatus Sa’adah. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 627–630.

Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen. Jakarta: Grasindo, tanpa tahun.

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Historis* 5, no. 2 (2020): 146–150.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. *Panduan Analisis Kelayakan Ekonomi.* Tanpa tahun.

Fahimatussyam, Ari, et al. “Mekanisme Pembiayaan dan Pelayanan Nasabah di Bank Syariah.” 1 (2025): 775–780.

Hasan, S., et al. *Studi Kelayakan Bisnis.* Bandung: Penerbit Widina, 2022.

Kendali, Sistem, et al. “Sistem Kendali Jarak Jauh untuk Pemutusan dan Penyambungan KWh Meter dengan Ponsel.” 12, no. 2 (2023): 138–143.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Ilmu Pengetahuan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tanpa tahun.

LTExa4MmL9GjXhwiVgoAcGo3aPrjSWnnGS6YGCz1.pdf. Tanpa tahun.

Manajemen Proyek. Jakarta: Bumi Aksara, 2024.

Muzayyanah, Titik, dan M. Daud Rhosyidy. “Kelayakan Ekonomi atas Implementasi Subsidi Listrik untuk Mengurangi Tunggakan pada Pelanggan

PT PLN (Persero) Kraksaan.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 403–411.

Niaga, Jurusan Administrasi, dan Politeknik Negeri Bali. “Implementasi Teknis Pengendalian Tunggakan Pelanggan Rekening Listrik Pascabayar di PT PLN (Persero) ULP Denpasar.” 2022.

Masruroh, Suprianik Nikmatul. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah.” 13, no. 2 (2023): 355–368.

Ningsih, Vira Kirana, dan Silva Syalikka. “Implementasi Subsidi Listrik dalam Pencapaian SDGs Tujuan 7.” 1, no. 4 (2024): 1–12.

Nugraha, Raditya Hari, Diana Purwitasari, dan Agus Budi Raharjo. “K-Means dan XGBoost untuk Analisis Perilaku Pembayaran Rekening Listrik Pelanggan.” 20 (2022): 84–98.

Perusahaan Listrik Negara, PT. *Company Profile*. Tanpa tahun.

Ravika Mutiara Savitrah, et al. “Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara.” 1 (2025): 543–547.

Sagala, Margrettha Lovinda. “Analisis Pelaksanaan Cara Perhitungan Pungutan Bea Keluar Beberapa Perusahaan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya.” 2022: 22–30.

Sari, Nurma Oktavia. “Pengaruh Subsidi Listrik terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Barat.” 2022.

Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. 2023.

Suwarna, Aiedil Pebri, et al. “Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan serta Pengaruhnya terhadap Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik.” 2025: 1662–1670.

Tim Penyusun. *Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022.

- Vidi, Buana, et al. "Analisis Hubungan Subsidi dan Non-Subsidi Listrik terhadap Konsumsi Listrik Rumah Tangga." 4, no. 1 (2025): 467–477.
- Widarma, Adi, dan Hana Kumala. "Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Pengguna Listrik Subsidi dan Nonsubsidi Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani." 2, no. 2 (2018): 165–171.
- Wisudawaty, Ika. "Analisis Dampak Subsidi Listrik terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah." Tanpa tahun: 33–39.
- Yanto, Bobi Heri, dan Yuhandri Yunus. "Evaluasi Penentuan Kelayakan Pemberian Subsidi Listrik dengan Metode MFEP." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 3 (2021): 2–4.
- Yochanan, E., Markus Wibowo, dan Rahmat Hidayat. *Studi Kelayakan Rumah Sakit Khusus Menjadi Rumah Sakit Umum*. Global Kreatif Media, 2025.
- Zakiyyatul Miskiyyah, Ummu, dan Ishmatun Nihayah. "Implementasi Metode Role Playing terhadap Minat Belajar Peserta Didik." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024): 1–8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Karimah
NIM : 222105030085
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik Dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Februari 2026

Saya menyatakan

Umi Karimah

(222105030085)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Keliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Umi Karimah
 NIM : 222105030085
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syari'ah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening tumitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikeljurnal dosen FEBI (sesuaidengantopikpenelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Februari 2026
 Pembimbing

Dr. Retna anggita ningsih, S.E, M.M
 NIP. 197404201998032001

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik Dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan Pt Pln (Persero) Ulp Kraksaan	<ol style="list-style-type: none"> Kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik Kebijakan subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> Kelayakan ekonomi Subsidi listrik Dampak kebijakan subsidi listrik bagi PLN 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis biaya Analisis Manfaat Perhitungan <i>ROI</i> Analisis <i>break efen</i> Perhitungan <i>NPV</i> Perhitungan <i>IRR</i> Evaluasi resiko <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses energi Menurunkan beban biaya Menjamin distribusi akses energi Positif: <ol style="list-style-type: none"> Mengurangi tunggakan resiko pelanggan Membantu menjaga kestabilan konsumsi listrik Negatif: <ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan pembayaran Biaya oprasional tetap tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Informan : <ol style="list-style-type: none"> Operasional produksi Staf Administrasi Bendahara koperasi Wawancara Observasi Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian Kualitatif Jenis Penelitian Studi kasus Lokasi Penelitian PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan Subyek Penelitian: Purposif Teknik Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Analisis data deskriptif Keabsahan data triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik dalam upaya mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) ULP di wilayah Kraksaan? Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan subsidi listrik dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pelanggan di PT PLN (Persero) ULP Kraksaan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 5201 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/12/2025 8 Desember 2025
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Manajer PT. PLN Persero ULP kraksaan
 Jl. Rengganis No.99, Patokan Kraksaan, Probolinggo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Umi Karimah
 NIM : 222105030085
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Akuntans Syariah
 Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "**Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan Pt Pln (Persero) Ulp Kraksaan**" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Bidang Akademik,

[Handwritten Signature]

Nurul Wahyuni Islami Rahayu



[Handwritten mark]

2 Desember 2025

Hal : Tanggapan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

- Di Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh

Nama	:	Umi Karimah
NIM	:	222105030085
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syari'ah

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan dengan judul "Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik Dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan". Dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disebutkan dalam lampiran surat permohonan.

Demikian surat tanggapan ini kami buat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan



9 Desember 2025

Hal : Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Bidang Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

- Di Tempat

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan izin penelitian yang diajukan oleh

Nama	:	Umi Karimah
NIM	:	222105030085
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syari'ah

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan penelitian di lingkungan PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan dengan judul penelitian "Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik Dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan".

Demikian surat pernyataan ini kami buat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan



JURNAL PENELITIAN



ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK
DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN PELANGGAN PT. PLN
(PERSERO) ULP KRAKSAAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	12 November 2025	Penyerahan Surat Izin Penelitian ke PLN Persero (ULP) Kraksaan	f
2.	15 November 2025	Wawancara dengan Manager ULP dan Supervisor bagian keuangan	f
3.	3 Desember 2025	Pengumpulan data sekunder berupa laporan tunggakan pelanggan, data subsidi listrik, dan profil ULP Kraksaan	f
4.	4 Desember 2025	Wawancara lanjutan dengan Manager ULP dan Supervisor bagian keuangan	f
5.	8 Desember 2025	Wawancara akhir dan dokumentasi penelitian di PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan	f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Umi Karimah
 NIM : 222105030085
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik dalam Mengurangi Tunggakan Pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Marifah ulFah, MEI
 197709142005012004



PERNYATAAN SITASI KARYA DOSEN

Dengan ini, peneliti yang beridentitas

Nama : Umi Karimah

Nim : 222105030085

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Judul : Analisis Kelayakan Ekonomi Penerapan Subsidi Listrik dalam Mengurangi
Tunggakan Pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan

Telah melakukan sitasi/menyandur karya Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebanyak 5 (lima) karya yang terdiri atas:

No	Nama Dosen	Judul Karya	Jenis Referensi	Referensi	Dikutip Hal
1	Ravika Mutiara Savitrah, SE., M.S.Ak.	Upaya Mengurangi Keterlambatan Pembayaran Listrik Pascabayar Di PT. PLN (Persero) ULP Kalisat	Jurnal Penelitian Nusantara	Ravika Mutiara Savitrah, Putri Dwi Rahayu, Shella Karunia Putri, Zilvin Nabila, Ravika Mutiara Savitrah. "Menulis□: Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 543–47.	548
2	M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E	Kelayakan Ekonomi Atas Implementasi Subsidi Listrik Untuk Mengurangi Tunggakan Pada Pelanggan PT. PLN (Persero) Kraksaan	Jurnal Penelitian Nusantara	Muzayyanah, Titik, and M Daud Rhosyidy. "Kelayakan Ekonomi Atas Implementasi Subsidi Listrik Untuk Mengurangi Tunggakan Pada Pelanggan PT . PLN (Persero) Kraksaan Menulis□: Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 403–11.	404
3	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi	Jurnal Penelitian Nusantara	Ahmad Afif, Lailiyatus Sa'adah. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di PT . PLN (Persero) ULP Kraksaan Menulis□: Jurnal	627

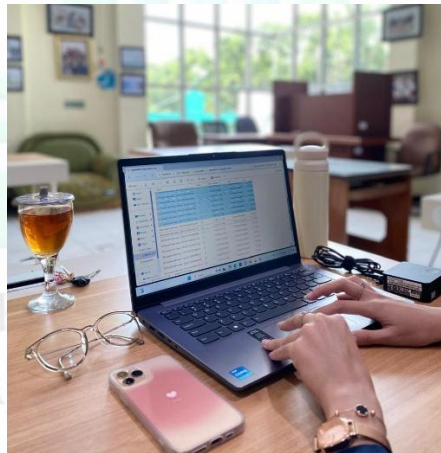
No	Nama Dosen	Judul Karya	Jenis Referensi	Referensi	Dikutip Hal
		Pengelolaan Keuangan Di PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan		Penelitian Nusantara" 1 (2025): 627-30.	
4	Ari Fahimatussyam PN., S.E., M.Ak	Mekanisme Pembiayaan Dan Pelayanan Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kc Jember Sudirman	Jurnal Penelitian Nusantara	Fahimatussyam, Ari, Putra Nusantara, Luqi Ikmalur Ramadhan, Alifta Ageng Syaputri, and Jazilah Wardatul Afwa. "Mekanisme Pembiayaan Dan Pelayanan Nasabah Di Bank Syariah" 1 (2025): 775-80.	776
5	Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores	Nikmatul Masruroh, Suprianik. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah 1)" 13, no. 02 (2023): 355-68. https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932 .	359

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Penelitian saat di Lapangan



Arsip pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan



Data tunggakan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan



Peneliti melihat arsip pelanggan PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan



Peneliti dan staf PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan



Peneliti dan staf PT.PLN (Persero) ULP Kraksaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Umi Karimah
 NIM : 222105030085
 Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 24 juli 2003
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Kedung caluk, Kecamatan
 Krejengan, Kabupaten Probolinggo
 No.telp : 087893009830
 E – Mail : umikarimah700@gmail.com
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Riwayat Pendidikan :

- a. TK PKK Anugrah Kedung Caluk 1
- b. SDN Kedung Caluk 1
- c. SMPN Krejengan 2
- d. SMAN 1 Kraksaan